

Warta

PERTANIAN

VOLUME VIII/EDISI AGUSTUS 2019

Menuju Kedaulatan Pangan

IBU KOTA BARU MANDIRI PANGAN



PENGARAH:

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian

PENANGGUNG JAWAB:

Kepala Biro Humas
dan Informasi Publik

PENYUNTING:

Drh. Moch. Arief Cahyono, M.Si

PELAKSANA:

Abiyadun, SE, MM

ANGGOTA:

Dra. Ria Satiti

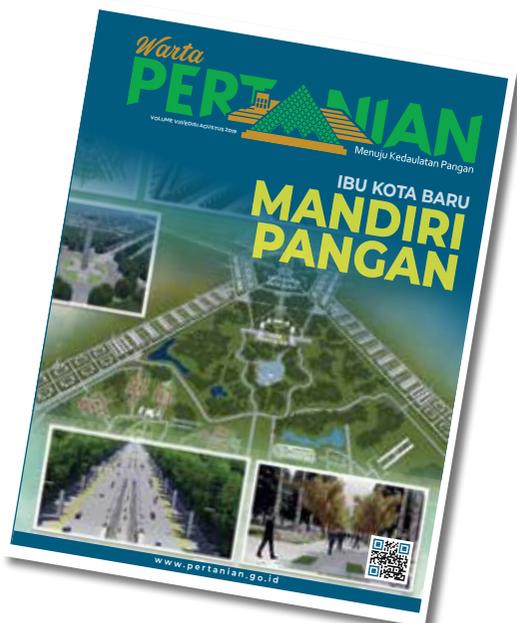
Imam Santoso, SE

Fajar Rahman M, S.IKOM

Alice Raga Dewi, S.Sos

Hendrayani Yacub, S.Sos

Makmur, SE



Isi diluar tanggungjawab percetakan

Dilarang mengutip tanpa izin
Majalah Warta Pertanian

SALAM REDAKSI

PENYANGGA PANGAN

IBU KOTA NEGARA BARU

KEMENTERIAN pertanian (Kementan) bergerak cepat begitu Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau Jokowi secara resmi mengumumkan dua kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim), yakni Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai calon ibu kota negara yang baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Apa yang dilakukan?



Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman rupanya langsung fokus mempersiapkan penyangga pangan bagi ibu kota negara baru. Caranya dengan Sistem Klaster tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan menggunakan teknologi pertanian modern.

Mimpi besarnya nanti, yakni membangun ibu kota baru tanpa impor pangan. Soalnya, pangan dapat diproduksi masyarakat Kaltim sendiri. Jadi kata kuncinya, ibu kota negara baru mandiri pangan.

Untuk mewujudkan itu, sejak awal Kementan telah menyiapkan 500 juta pohon bibit tanaman perkebunan senilai Rp10 triliun. Pada 2018, bantuan yang bibit hortikultura yang telah diberikan sekitar 30 sampai 50 ribu dan ditingkatkan 100 ribu pohon per tahun. Kementan juga sudah mengirim sapi terbesar tiga tahun lalu untuk Kaltim sebanyak 2.000 ekor. Ini terbesar di seluruh Indonesia.

Benua Etam, julukan Kaltim memang memiliki beragam komoditas pertanian unggulan untuk diekspor di antaranya hasil karet olahan; produk kayu olahan seperti plywood, moulding, veneer kruing; lada biji; produk olahan turunan kelapa sawit; dan sebagainya. Negara-negara yang tujuan ekspor antara lain Tiongkok, Vietnam, Myanmar, India, Taiwan, Amerika Serikat (AS), dan sebagainya.

Secara nasional, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat sejak pemerintahan Jokowi-JK, ekspor naik 9 juta ton atau rata-rata kenaikan ekspor pertanian per tahun sebesar 2,4 juta ton. Pada 2013, total ekspor hanya 33 juta ton, namun pada 2018 mencatat nilai tertinggi sebesar 42,5 juta ton.

Nah jika ibu kota negara baru tanpa impor, tentu diproyeksikan sebagai pendukung ekspor, bahkan menjadikan lumbung pangan dunia. Karenanya, tongkat estafet kebijakan pangan Mentan Amran dalam mempersiapkan penyangga pangan bagi ibu kota negara baru yang ditargetkan beroperasi pada 2024 harus dilanjutkan Mentan berikutnya. Ini mengingat pada 20 Oktober 2019 di Istana Negara, Jakarta akan dilakukan pelantikan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Dengan pelantikan kepala negara itu, otomatis kabinet baru akan terbentuk, termasuk posisi Mentan. (*)



4



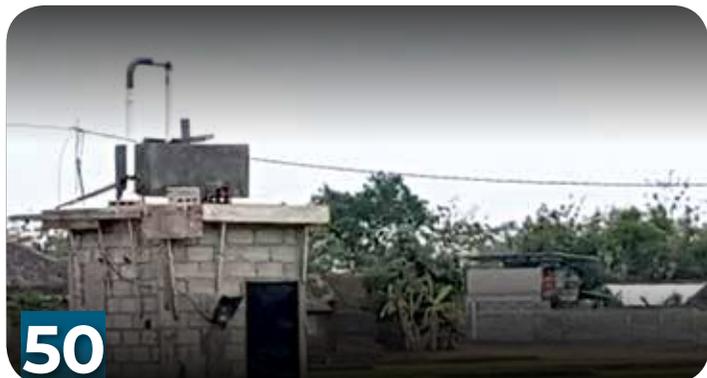
9



22



31



50

5

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019) resmi mengumumkan dua kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim), yakni sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai calon ibu kota negara yang baru.

9

Benua Etam, julukan Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki beragam komoditas pertanian unggulan untuk diekspor ke luar negeri seperti Tiongkok, Vietnam, Myanmar, India, Taiwan, Amerika Serikat (AS), dan sebagainya.

12

Kepiawaian Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian (Mentan) bersama jajarannya dalam meramu dan membangun strategi pertanian, khususnya pangan sudah tidak disangsikan lagi.

18

Berbagai cara dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menggenjot ekspor pertanian.

22

Sejak lima tahun belakangan, laju ekspor pertanian Indonesia tak pernah berhenti. Bahkan mengalir dengan deras bak air terjun.

29

Kementerian Pertanian (Kementan) melirik potensi lahan rawa yang luar biasa besar untuk memenuhi kebutuhan pangan yang tengah dihadapkan adanya alih fungsi lahan.

30

Di tengah era ekonomi digital saat ini, Kementerian Pertanian (Kementan) melihat adanya potensi besar yang bisa dikembangkan di lingkungan pondok pesantren (ponpes).

49

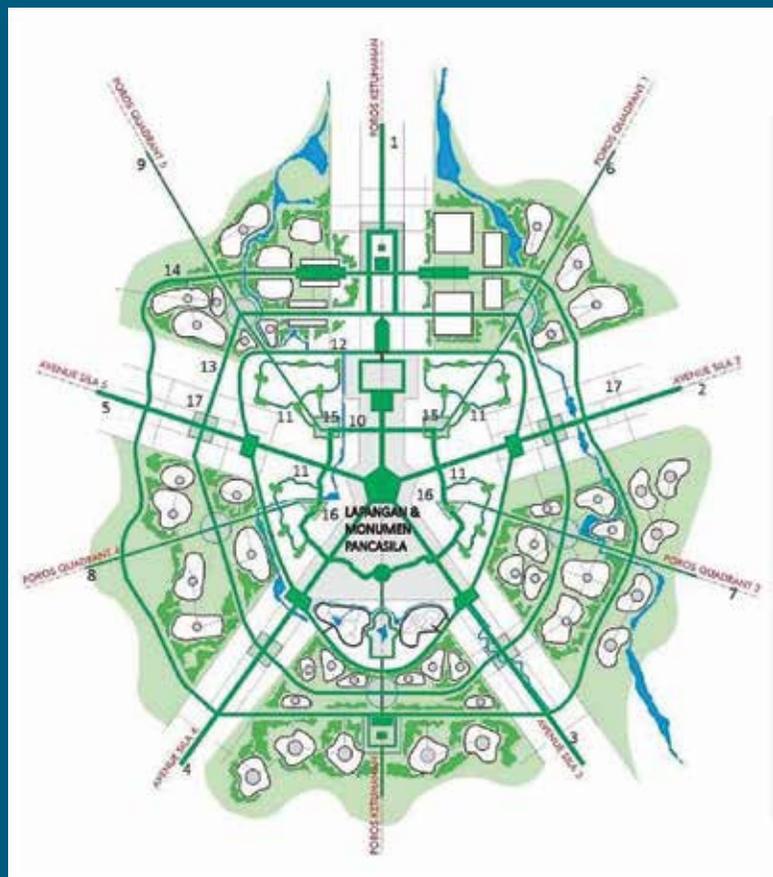
Sejak beberapa waktu yang lalu, Kementerian Pertanian (Kementan) sudah melakukan upaya mengurangi dampak atau mitigasi kekeringan.



Jadi semua kebutuhan pangan bisa dipenuhi sendiri tanpa adanya impor. Bahkan diproyeksikan menjadi pendukung ekspor dan lumbung pangan dunia,”

Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau Jokowi pada Senin (26/8/2019) resmi mengumumkan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai calon ibu kota negara baru yang akan menggantikan DKI Jakarta. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat calon ibu kota baru itu, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan strategi pengembangan kawasan penyangga mandiri pangan. Seperti apa?



Kementan Siapkan Sistem Klaster Tanpa Impor

IBU KOTA BARU MANDIRI PANGAN

PRESIDEN Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019) resmi mengumumkan dua kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim), yakni sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai calon ibu kota negara yang baru.

Nah untuk mendukung penetapan calon ibu kota baru itu, dari sisi pertanian, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman serius mempersiapkan penyangga pangan bagi calon ibu kota negara baru melalui Sistem Klaster tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan menggunakan teknologi pertanian modern. "Jadi semua kebutuhan pangan bisa dipenuhi sendiri tanpa adanya impor. Bahkan diproyeksikan menjadi pendukung ekspor dan lumbung pangan dunia," ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD)

dengan tema 'Strategi Pengembangan Kawasan Penyangga Kemandirian Pangan Ibu Kota Negara Baru di Kaltim', Balikpapan, Jumat (30/8/2019) malam.

Hadir dalam diskusi ini Gubernur Kaltim Isran Noor, Pangdam VI/ Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto, perwakilan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, jajaran Eselon I Kementan, serta para bupati se-Kaltim, dan sebagainya.

Mentan menambahkan, pihaknya telah melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan pangan ke depan, dalam memenuhi kebutuhan pangan calon ibu kota baru dengan membangun klaster pengembangan komoditas. Lahan pertanian di Kaltim sangat cocok untuk menghasilkan pangan, khususnya komoditas hortikultura, sehingga produksi pangan berdasar agroklimat dan kultur masyarakat setempat.



"Ibu kota baru mandiri pangan. Ini kata kuncinya. Mimpi besar kami adalah menyiapkan pangan untuk penduduk di calon ibu kota baru lebih awal. Katakanlah pindah pada 2024 (target pemerintah, red), umur komoditas hortikultura dua sampai tiga tahun sudah berbuah," ujarnya.

Karena itu, Amran menegaskan, mimpi besarnya nanti, yakni membangun ibu kota baru tanpa impor pangan, sebab pangan dapat diproduksi masyarakat Kaltim sendiri. Ini dapat diwujudkan karena Kementan sejak awal telah menyiapkan 500 juta pohon bibit tanaman perkebunan yang akan menelan anggaran Rp10 triliun. Pada 2018, bantuan yang bibit hortikultura yang telah diberikan sekitar 30 sampai 50 ribu dan ditingkatkan 100 ribu pohon per tahun.

"Kemudian kami juga sudah kirim sapi terbesar tiga tahun lalu untuk Kaltim sebanyak 2.000 ekor, terbesar di seluruh Indonesia. Potensi padi sudah kami hitung yang minus, tinggal 60 ribu ton. Ini sangat kecil sebab lahan rawa Kalimantan yang dijadikan lahan pertanian sudah selesai, sehingga produksi padi kita surplus dan nantinya ekspor ke negara tetangga," bebernya.

"Tetapi kami ingin seluruh 10 kabupaten di Kaltim membuat klaster budidaya pangan. Misalnya, kabupaten mana yang menyuplai ayam, daging sapi, bawang merah, cabai, dan seterusnya, sehingga kebutuhan pangan di ibu kota negara baru ini dipenuhi sendiri dari produksi masyarakat setempat," pintanya.

Dengan demikian, lanjut Amran, kebutuhan beras negara tetangga seperti Malaysia yang butuh sebanyak 1,5 ton dapat dipenuhi dari Indonesia dan ini bisa disuplai dari produksi di Kalimantan. Sementara produksi padi di Kaltim untuk memenuhi kebutuhan masyarakat calon ibu kota baru.

"Kami tahu Kabupaten PPU, traktornya telah kami berikan 300 unit. Jadi alsintan (alat mesin pertanian) terbanyak dan sapi terbanyak kami sudah berikan Kaltim. Ke depan bantuan kami tambah lagi," tandasnya.

Amran optimistis ini terwujud karena Kaltim memiliki potensi yang sangat luar biasa, yakni lahan pertanian yang masih original dan luas. Sebanyak 10 kabupaten di Kaltim yang dijadikan sebagai kawasan penyangga pangan, sehingga ke depan ibu kota baru dipastikan mandiri pangan.

Kabupaten Berau dibangun menjadi sentra produksi jagung dan bawang merah, Kabupaten Bulungan dan Nunukan sebagai sentra padi, cabai dan bawang merah dan Malinau sebagai sentra produksi padi dan jagung.

Selanjutnya, Kabupaten Tana Bumbu menjadi sentra produksi padi dan cabai, Tanah Laut sebagai sentra padi, jagung, cabai dan bawang merah, Kapuas Hulu sebagai sentra padi, cabai dan bawang merah, Ketapang sebagai sentra cabai, Kutai Barat sentra padi dan jagung dan Kabupaten Paser sentra padi, cabai dan bawang merah.

"Untuk penyediaan daging sapi, ayam, buah-buahan



dan komoditas lainnya dibangun klaster. Jadi kabupaten mana yang memproduksi ayam dan seterusnya," terang Amran.

Amran menambahkan, membangun klaster ini sejalan dengan gagasan besar Presiden Jokowi. Masing-masing kabupaten akan dibangun klaster-klaster komoditi pertanian yang dikoperasikan. Kemudian koperasi nantinya dikorporasikan sehingga klaster tersebut menjadi kuat yang pengelolaannya dengan sistem teknologi yang tinggi, biaya murah, profitable, dan pengolahannya tentu dari hulu ke hilir. "Karena itu, membangun ibu kota baru tanpa impor pangan, sebab pangan dapat diproduksi masyarakat Kaltim," tegasnya.

Gubernur Kaltim Isran Noor mengapresiasi langkah cepat Mentan Amran dalam penyediaan kemandirian pangan di wilayahnya yang merupakan calon ibu kota negara baru. Karena itu, ia memberikan acungan jempol terhadap kesediaan Mentan Amran untuk membahas strategi atau upaya penyediaan pangan nasional.

"Saya dan Mentan Amran dulu satu profesi sebagai penyuluh. Beliau nasibnya bagus menjadi menteri dan mudah-mudahan ke depan semakin bagus. Kami bangga dan bahagia malam ini dihadiri Menteri (Amran, red) guna membahas strategi menyediakan pangan untuk masyarakat ibu kota baru negara di Kaltim," ujarnya.

Ketua Presidium Majelis Nasional KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) Hamdan Zoelva menilai upaya penyediaan pangan mandiri di ibu kota negara baru dan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia tersebut merupakan gagasan yang luar biasa dan

optimisti dapat diwujudkan. Pasalnya, kedaulatan pangan menjadi bagian yang sangat penting bagi kedaulatan dan kekuatan sebuah bangsa.

"Tadi yang disampaikan Mentan Amran Sulaiman, cita-cita kedaulatan pangannya itu bukan lagi kecil, tapi sudah jauh melompat ke depan, yaitu menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa dan memang kalau kita lihat dari berbagai sisi, luas lahan Kalimantan masih banyak yang belum dikelola. Maka kesempatan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan itu bukanlah mimpi belaka, namun sesuatu yang optimis bisa diwujudkan," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasioanl (Rakornas) II KAHMI dengan tema 'Mewujudkan Kemandirian Energi dan Pangan Bagi Kesejahteraan Rakyat' di Balikpapan, Kaltim, Sabtu (31/8) yang dihadiri Mentan Amran Sulaiman.

Hamdan berharap ke depan generasi muda harus berpikir untuk menjadikan pertanian modern sebagai profesi dan menggunakan teknologi pertanian yang sudah maju. Sebab potensi lahan Indonesia sangat luas dan jika dikelola oleh generasi milenial, dipastikan pertanian Indonesia semakin kuat dalam mencukupi kebutuhan sendiri dan ke depan justru menyuplai pangan untuk dunia.

"Karena itu, ketika Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, pertanian menjadi sektor yang berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan domestik bruto yang mempengaruhi kemakmuran masyarakat Indonesia. Ini yang menjadi perhatian kita dan perkembangan kinerja sektor pertanian saat ini sangat luar biasa," tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.



Dalam paparan di depan peserta Rakornas II KAHMI, Mentan Amran optimistis bisa membangun kemandirian pangan untuk ibu kota baru negara di Kaltim tanpa harus disuplai dari negara lain alias impor. Strateginya, yakni pengembangan kawasan komoditas sebagai penyangga pangan melalui sistem klaster budidaya untuk masing-masing 10 kabupaten di Benua Etam, julukan Kaltim.

“Kata kuncinya kami membangun ibu kota baru yang mandiri pangan. Mimpi besar kami adalah menyiapkan pangan untuk penduduk di ibu kota baru, kita siapkan lebih awal. Nantinya pada 2024, kebutuhan pangan langsung dipenuhi sendiri dari masyarakat Kaltim, karena umur komoditas hortikultura dua sampai tiga tahun sudah berbuah,” ujarnya.

Pada Rakor KAHMI ini, Amran menyerahkan bantuan untuk kelompok tani binaan Kahmi berupa traktor roda empat sebanyak 10 unit, bibit jagung untuk 100 ribu ha, dan bibit tanaman dan hortikultura untuk 50 ribu ha.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Februari 2019 menyerap tenaga kerja terbanyak sampai 20,52 persen. Data BPS juga menyatakan Nilai Tukar Petani (NTP) di Kaltim pada Juni 2019 naik 0,07 persen dibanding bulan sebelumnya.

Salah satu komoditas yang membaik harganya, yaitu sayur-sayuran dan ternak besar maupun ternak kecil. BPS Kaltim juga mencatat pada Juli 2019, ada tiga subsektor pertanian yang mengalami peningkatan NTP, yaitu subsektor tanaman pangan naik 0,60 persen, subsektor hortikultura 0,50 persen dan subsektor peternakan 0,42 persen.

Sebelumnya, pemerintah sudah melakukan kajian mendalam dan mengintensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir. Hasil kajian menyimpulkan lokasi calon ibu kota baru adalah sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim yang akan menggantikan DKI Jakarta. “Sejumlah alasan dibalik pemilihan Kaltim sebagai ibu kota baru, di antaranya risiko bencana minimal, baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, dan tanah longsor,” ujar Presiden Jokowi saat melakukan konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Kemudian, lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, alasan lain karena lokasi Kaltim yang strategis berada di tengah Indonesia, daya dukung sosial dan budaya serta memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Untuk anggaran, Jokowi menerangkan, pembiayaan ibu kota negara baru akan didanai dari tiga sumber pendanaan, yakni sekitar 54,6 persen akan didanai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), lalu 26,2 persen dari swasta, dan 19,2 persennya didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian tidak akan membebankan APBN dan tak akan mengganggu pembangunan SDM dan prioritas lain. Total kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota

negara baru sekitar Rp466 triliun.

Pembangunan gedung eksekutif, legislative, dan yudikatif, infrastruktur selain yang tercakup APBN, sarana pendidikan dan kesehatan, museum dan lembaga pemasyarakatan, serta sarana penunjang akan didanai KPBU.

Sementara, perumahan umum, perguruan tinggi science-technopark, peningkatan bandara, pelabuhan dan jalan tol, sarana kesehatan, shopping mall, MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) akan dibiayai dari dana swasta.

Sedangkan APBN yang besarnya 19,2 persen akan digunakan untuk infrastruktur pelayanan dasar, Istana Negara, dan bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer. Kawasan induk ibu kota baru akan memakan luas wilayah sekitar 40 ribu ha, selanjutnya akan dikembangkan menjadi 180 ribu ha dari tanah yang dimiliki pemerintah. Tahap awal pemerintah membutuhkan lahan seluas 3.000 ha. Pembangunan akan dimulai pada 2021 dan ditargetkan pada 2024 pemindahan ibu kota baru sudah bisa dilaksanakan. **(tim humas)**





BENUA ETAM

DAN KOMODITAS UNGGULAN EKSPOR

BENUA Etam, julukan Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki beragam komoditas pertanian unggulan untuk diekspor ke luar negeri seperti Tiongkok, Vietnam, Myanmar, India, Taiwan, Amerika Serikat (AS), dan sebagainya. Komoditas unggulan itu di antaranya hasil karet olahan; produk kayu olahan seperti plywood, moulding, veneer kruing; lada biji; produk olahan turunan kelapa sawit; dan sebagainya.



Kepala Karantina Pertanian Samarinda Agus Sugiyono mengungkapkan, berdasarkan data Sistem IQFAST (Indonesian Quarantine Full Automation System) Karantina Pertanian Samarinda tercatat sepanjang 2018 sebanyak 266 kali ekspor asal Kaltim mencapai Rp82,42 miliar. Sedangkan periode Januari hingga Juli 2019, tercatat total nilai ekspor telah mencapai Rp57,21 miliar.

Agus Sugiyono menambahkan, terdapat beberapa komoditas pertanian dan bahan asal hewan yang memiliki potensi ekspor dari Kaltim, tapi hingga saat ini belum dapat diekspor langsung dari Samarinda seperti pisang kepok asal Kecamatan Kaliorang Kutim, nanas sarikaya asal Kecamatan Palaran, sarang burung walet asal Samarinda, Kutim dan Kubar serta taring babi asal Kubar.

Sementara itu, Kementan melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) kembali melepas hasil olahan turunan kelapa sawit Palm Kernel Expeller (PKE) sebanyak 1.996,78 ton senilai Rp2,23 miliar tujuan Vietnam. "Ekspor komoditas pertanian terus kami gencarkan, selain PKE juga diekspor komoditas primadona asal Kaltim seperti hasil olahan kayu Veneer Kruing sejumlah 67,1627 m3 senilai Rp602 juta tujuan

India dan beberapa komoditas lainnya," ungkap Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Agus Sunanto yang mewakili Kepala Barantan saat lepas ekspor di Kantor Karantina Pertanian Samarinda, Kaltim, Kamis (8/8/2019).

Dia menuturkan, sebelumnya Kaltim merupakan salah satu daerah penghasil rempah di Kalimantan, tapi seiring berkembangnya waktu Pulau Kalimantan menjadi penghasil kayu terbanyak di Indonesia. Karena itu hasil olahan kayu masih tetap menjadi primadona ekspor di Kaltim hingga saat ini.

Berbeda dengan pelepasan ekspor sebelumnya, kali ini juga turut dilepas ekspor komoditas potensial asli Kaltim, yakni Lada biji sebanyak 50 ton dengan nilai ekspor sebesar Rp476 juta dengan tujuan ekspor ke Vietnam.

Ke depan, Agus mengajak para investor industri olahan untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan mengolah lada menjadi bentuk jadi, minimal setengah jadi. "Jadi bisa memberikan nilai tambah untuk masyarakat," tandasnya.

Karantina Pertanian Samarinda sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Barantan berperan tingkatkan akselerasi ekspor dengan berikan layanan tercepat dan



fasilitasi Phytosanitary Certificate (PC). "Dengan dukungan Karantina Pertanian Samarinda dalam akselerasi ekspor produk pertanian dalam bentuk pelayanan cepat dengan Service Level Agreement satu jam hingga satu hari dengan pelayanan 24 jam tujuh hari kerja ini diharapkan dapat meningkatkan akselerasi ekspor dari Kaltim hingga 200 persen dari tahun sebelumnya," tambah Agus.

"Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi melalui Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni ekspor dan investasi, maka Barantan dan seluruh jajaran unit kerjanya lakukan terobosan dan percepatan layanan guna mendongkrak ekspor," ujarnya Agus.

Wali Kota Samarinda yang diwakili Asisten II, Endang Liansyah menyampaikan pihaknya mendukung penuh adanya program akselerasi ekspor yang digalakkan Kementan melalui Barantan. Pihaknya juga menyambut baik ajakan untuk mengundang lebih banyak investor industri olahan khususnya untuk mengolah produk-produk pertanian asal Samarinda.

Endang menambahkan, dengan adanya fasilitas penerbangan langsung dari Samarinda melalui Bandara APT Pranoto ini diharapkan ke depan komoditas potensial tersebut dapat menjadi komoditas ekspor langsung dari Samarinda.
(tim humas)





TERBUKTI SEKTOR PERTANIAN TUAI KESUKSESAN

KEPIAWAIAN Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian (Mentan) bersama jajarannya dalam meramu dan membangun strategi pertanian, khususnya pangan sudah tidak disangsikan lagi. Terbukti, kinerja pembangunan sektor pertanian selama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) menuai hasil membanggakan. Karenanya, tonggak awal kebijakan Amran dalam mempersiapkan penyangga pangan bagi calon ibu kota negara baru di Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Sistem Klaster dapat dilanjutkan dengan baik oleh Mentan selanjutnya. Ini mengingat pada 20 Oktober 2019 di Istana Negara, Jakarta akan dilakukan pelantikan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat sejak pemerintahan Jokowi-JK, ekspor naik 9 juta ton atau rata-rata kenaikan ekspor pertanian per tahun sebesar 2,4 juta ton. Pada 2013, total ekspor hanya 33 juta ton, namun pada 2018 mencatat nilai

tertinggi sebesar 42,5 juta ton.

BPS pun mencatat, terjadi penurunan inflasi bahan makanan yang sangat signifikan dari 10,57 persen pada 2014 menjadi 1,69 persen pada 2018. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian pun naik, yakni dari target PDB 3,5 persen, pertanian mampu menembus 3,7 persen. Begitu pula penduduk miskin di pedesaan menurun dari 14,17 persen pada 2014 menjadi 13,2 persen pada 2018.

BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) turut mencatat, bahwa investasi sektor pertanian meningkat tajam selama beberapa tahun terakhir. Pada 2013 hanya Rp29,3 triliun, namun pada 2018 naik menjadi Rp61,6 triliun, sehingga naik 110 persen.

Terkait kenaikan nilai PDB, Kepala BPS Pusat Suhariyanto mengatakan, kenaikan juga terjadi pada awal 2019 Triwulan II, dimana PDB Sektor Pertanian tumbuh sebesar 5,41 persen tanpa Kehutanan dan Perikanan. "Angka ini juga lebih tinggi dari pertumbuhan

Triwulan II/2017 dan 2018 yang tumbuh masing-masing 3,00 persen dan 5,01 persen,” katanya di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

“Peningkatan tahun ini meliputi semua PDB subsektor seperti tanaman pangan yang tumbuh 5,13 persen, hortikultura 6,11 persen, perkebunan 4,45 persen, dan peternakan 7,78 persen,” katanya.

Suhariyanto mengatakan, pertumbuhan di Triwulan II tahun-tahun sebelumnya menunjukkan kinerja sektor pertanian berjalan dengan baik. Terlebih pada bagian subsektor tanaman pangan yang secara tidak langsung berdampak pada sisi produksi dan ketersediaan pangan dalam negeri. “Membaiknya kinerja dan pertumbuhan PDB Sektor Pertanian pada Triwulan II ini menyebabkan kontribusi PDB Sektor Pertanian terhadap PDB Nasional membaik dan menduduki urutan kedua dibawah Sektor Industri, dan atas perdagangan, konstruksi serta pertambangan,” katanya.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan, semua peningkatan yang dicapai ini tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian dengan program dan kebijakan yang tepat dan terukur. “Pada Subsektor Tanaman Pangan, program terobosan UPSUS Pajale mampu meningkatkan produksi padi dan jagung secara signifikan,” katanya.

Dalam subsektor hortikultura, pemerintah juga terus mendorong peningkatan produksi

hortikultura melalui bantuan benih unggul dan kebijakan pengendalian impor. “Pada subsektor peternakan, kami memacu peningkatan produksi dan populasi ternak sapi dan kerbau melalui program Upsus SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting), sehingga mampu meningkatkan populasi ternak hampir 3,8 juta ekor,” katanya.

Di samping itu, Kementan juga menyiapkan program terobosan jangka panjang selama lima tahun ke depan. Program itu ialah Bun500 untuk penyediaan sebanyak 500 juta batang benih unggul perkebunan. “Semua upaya ini untuk meningkatkan produktivitas perkebunan menjadi berlipat-lipat,” katanya.

Kuntoro menambahkan, program dan kebijakan pembangunan pertanian saat ini secara tidak langsung juga mampu mendongkrak dan berkontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional. Rentetan catatan kenaikan ini bisa dilihat dari periode 2013-2017, di mana akumulasi tambahan nilai PDB mampu mencaoai Rp1.375 triliun atau naik 47 persen.

Sementara itu, perayaan HUT ke-47 RI pada Sabtu (17/8/2019) di Kantor Pusat Kementan tahun ini terasa berbeda. Nuansa kebhinnekaan sangat kental dalam upacara hari ini (17/8), para pejabat tinggi mulai dari level dirjen/kepala badan hingga staf menggunakan baju adat daerah Indonesia. Mentan Amran selaku inspektur upacara dengan baju adat Bugisnya tampak gagah dan berwibawa. “Kita bersyukur atas capaian luar biasa Kementan





selama lima tahun. Pegawai Kementan telah bekerja sangat keras dan membuahkan prestasi yang mengagumkan," katanya.

Mengutip hasil riset Bappenas, Mentan mengatakan, sektor pertanian dan perikanan, penyumbang pertumbuhan ekonomi daerah. Akumulasi Kenaikan PDB sektor pertanian melonjak hingga mencapai Rp1.375 triliun atau naik 47 persen. Menilik data 2017 dan 2018 misalnya, PDB saat itu nyatanya tumbuh sebesar 3,7 persen atau melampaui target yang ditetapkan, yakni sebesar 3,5 persen. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat WTP hingga tiga tahun berturut-turut atas pengelolaan keuangan Kementan yang sangat baik.

Selain itu, lanjut Mentan, saat ini investasi sektor pertanian pun meningkat hingga di atas 100 persen secara akumulatif selama 4,5 tahun. "Semua keberhasilan tersebut perlu perjuangan, dan ini berkat kerja keras seluruh karyawan Kementan se-Indonesia. Saya minta, semua ini dirawat dan menjadi lebih bagus," tambahnya.

Lompatan sektor pertanian dalam menjaga ketersediaan stok pangan, antara lain hingga saat ini stok beras Bulog mencapai 2,5 juta ton, stop impor jagung sebesar 3,6 juta ton, dan kini ekspor akibat produksi nasional yang makin baik. Begitu pula dengan beberapa komoditas lainnya seperti bawang merah dan

cabai.

Lompatan sektor energi dengan biodiesel B100 yang digagas Presiden, tidak terlepas dari kemampuan riset pertanian yang maju dalam 4 tahun terakhir. "Target presiden pada 2022 untuk memanfaatkan B100 secara penuh bukan hal mustahil. Produksi minyak sawit kita 9,1 juta ton pada kuartal I/2019, masih mencukupi untuk pemenuhan ekspor dan biodiesel. Kesejahteraan petani akan terus terdongkrak dengan B100," tegas Amran. B100 lebih murah 40 persen dibanding bahan bakar solar lainnya, dan mampu menghemat 26 triliun devisa negara, lanjutnya.

Di lain pihak, menanggapi pertanyaan beberapa kalangan terkait semakin menurunnya anggaran pembangunan sektor pertanian, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Momon Rusmono menegaskan tidak ada yang perlu dikawatirkan. Kementan selama lima tahun terakhir telah bekerja sangat keras untuk terus meningkatkan produksi dan mencukupi ketersediaan pangan. "Bapak Menteri Pertanian sebagai 'policy maker' secara cerdas dan berani telah menetapkan 80 persen anggaran Kementan fokus untuk kesejahteraan petani. Alokasi anggaran untuk pembangunan pertanian diperkuat luar biasa," kata Momon.

Melalui berbagai program unggulan khususnya dalam penyediaan benih unggul, alsintan, pupuk,

dan ketersediaan irigasi menjadi fokusnya. Bappenas secara khusus juga telah memberikan apresiasi belanja barang dalam program Kementan, dinilai memacu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Momon menjelaskan, anggaran Kementan memang terus turun dari tahun ke tahun. Pada 2015 yang tertinggi sebesar Rp32,72 triliun. Kemudian pada 2016 turun jadi Rp27,72 triliun, pada 2017 Rp 24,23 triliun, Rp23,90 triliun (2018), dan Rp21,71 triliun (2019), dan yang terbaru untuk 2020 ditetapkan sebesar Rp21,05 triliun. "Kementan tidak terlalu risau terkait ini. Menilik capaian kinerja Kementan selama lima tahun, faktanya penurunan anggaran bukan menurunkan kinerja. Tapi indikator kinerja makro Kementan selama 2014-2018 malah terus meningkat," jelasnya bangga.

Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI) menyampaikan penghargaan kepada Mentan Amran atas kinerja pembangunan pertanian selama pemerintahan Jokowi-JK periode 2015-2019. Bahkan Wakil Rektor IPB sekaligus Sekjen PERAGI Prof Agus Purwito sangat mengapresiasi capaian Kementan yang dinakhodai Andi Amran Sulaiman karena sudah berhasil meningkatkan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani sehingga berdampak pada kinerja positif ekonomi makro. "Ini dapat kita lihat dari stabilitas harga produk pertanian dalam kurun lima tahun terakhir dan tingkat inflasi yang rendah," ungkapnya usai pertemuan dengan Mentan Amran di Jakarta, Senin (19/8/19).

Beberapa gebrakan juga Amran dianggap berpengaruh besar terhadap tujuan pembangunan mencapai ketahanan serta kedaulatan pangan di Tanah Air. "Kadang kebijakan yang dibuat Mentan Amran harus membuatnya berhadapan dengan para mafia. Dirasa merugikan kepentingan lain (mafia, red) bila menyangkut urusan pangan," ujar pengamat ekonomi Ichsanudin Noorsy, Senin (26/8/2019).

Kendati kerap memperoleh tantangan, Noorsy menilai Amran seolah tak gentar menghadapinya. Mentan Amran terus bekerja untuk menggapai hasil optimal.

"Amran telah sering difitnah.

Mafia (pangan, red)

pakai segala

cara untuk

menjelekkan Amran sampai ingin menyerang karakter personal Amran," tandasnya.

Pengamat Politik Hendri Satrio mengungkapkan, Mentan Amran merupakan sosok menteri yang selama memimpin Kementan kurun waktu hampir lima tahun bekerja tanpa batas. Amran memiliki program terobosan dan strategis dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan, tindak tegas mafia pangan dan menciptakan pemerintahan yang bersih. "Mentan Amran dihari libur tetap bekerja dan selalu di lapangan. Sabtu-Minggu bekerja sampai malam, rapat maraton bersama Eselon I, dinas pertanian dan para mitra. Artinya, walaupun masa jabatan tinggal satu bulan lebih, tidak pernah mengenal waktu," tegasnya di Jakarta, Senin (26/8/2019).

Di tempat terpisah, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru juga menyampaikan apresiasi atas perhatian Kementan terhadap pembangunan pertanian, peningkatan kesejahteraan petani dan mitigasi kebakaran lahan di wilayahnya, Rabu (28/8/2019) di Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (OKI). "Pada tahun ini Sumsel diberikan Program SERASI (Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani) 200 ribu ha, untuk kawasan pertanian di Banyuasin dan OKI. Mentan Amran membantu petani tradisional yang konvensional megolah lahan menjadi petani modern," terang Herman

s a a t mendampingi kunjungan kerja Mentan Amran.

Kenaikan produksi padi di Sumsel sebesar 1.6 juta ton, dan dengan Program SERASI akan menjadi penghasil beras nomor satu di Indonesia."Dulu kami hanya peringkat 8 nasional, tapi kita sudah lima besar nasional sejak periode Mentan Amran dilaksanakan secara masif," kata Herman. **(tim humas)**





EKSPOR MELESAT, MAFIA PANGAN

Meringis

pembangunan pertanian saat ini,” tuturnya pada Kamis (1/8/2019).

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau (UIR) Dr Ujang Paman menilai kebijakan yang diimplementasikan Kementan, yakni Program Upaya Khusus (Upsus) swasembada komoditas strategis, akselerasi penggunaan alat mesin pertanian (alsintan), implementasi pertanian modern, dan bibit unggul yang berorientasi pada produktivitas dan adaptif terhadap cekaman lingkungan.

“Pembangunan pertanian Indonesia saat ini tidak lagi bersifat klasik, tetapi sudah dimulai ke pertanian komersial dan modern dengan Pertanian 4.0, yang mana sudah mulai digunakan mesin pertanian yang dikontrol melalui Internet atau dengan teknologi Internet of Things (IoT),” ujarnya pada Jumat (2/8/2019).

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan, sektor pertanian masih menjadi tumpuan Indonesia dalam mendulang devisa negara. Salah satu yang paling diandalkan adalah ekspor produk perkebunan, namun sekarang sudah mulai bermunculan produk hortikultura, pangan dan peternakan yang permintaannya terus meningkat di pasar dunia.

Ekspor produk-produk tersebut terus digenjut pemerintah, dengan menaikkan kuantitas sekaligus juga menjaga dari sisi kualitas produk, dan memangkas sistem perizinan ekspor sesingkat mungkin.

“Tidak hanya mendatangkan devisa, ekspor produk pertanian membawa banyak dampak positif lainnya seperti peningkatan produksi, mutu, stabilitas harga dalam negeri hingga menyejahterakan petani,” ujarnya, Selasa (6/8/2019).

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Roslan P. Roslani menambahkan, kondisi pangan Indonesia saat ini tidak dapat dikategorikan sepenuhnya mengandalkan impor. Beberapa produksi pangan nasional bahkan mampu surplus. “Saat ini ancaman impor sebetulnya sudah mulai bisa dikurangi jika melihat pada hasil kerja sektor pertanian. Tren sektor pertanian mulai mampu memiliki nilai tambah,” ujarnya, Kamis (22/8/2019).

Pengamat pertanian dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Yunus Musa mengatakan, kemajuan ekspor produk pertanian dan keberhasilan mencapai surplus perdagangan internasional dapat disimpulkan juga telah mampunya Indonesia untuk mandiri pangan.

S EJUMLAH pihak menilai kinerja positif ekspor pertanian selama ini membuktikan kebijakan dan program Kementerian Pertanian (Kementan) tidak hanya berhasil meningkatkan produksi, tetapi juga meningkatkan nilai ekspor pertanian. Perlu diketahui, produksi dan capaian ekspor sektor pertanian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2015, nilai ekspor pertanian sebesar Rp403,8 triliun. Nilainya meningkat tajam pada 2018, angkanya naik menembus angka Rp499,3 triliun.

Harbrinderjit Singh (HS) Dillon, pemerhati pertanian mengapresiasi upaya dan kerja keras Kementan dalam meningkatkan produksi melalui berbagai kebijakan dan program terobosan. Upaya itu nyatanya juga mampu membawa produk Indonesia menembus pasar ekspor dunia.

Selain itu, kata Dillon, program dan kebijakan strategis ini juga berhasil memutus mata rantai mafia pangan yang selama ini menghambat lalu lintas pasar ekspor. Sebab, meningkatnya angka ekspor akan menjadi kabar buruk sekaligus hal yang tidak diinginkan oleh lingkaran mafia. “Dengan begitu para mafia pangan jadi kehilangan pekerjaannya. Sebab pangan yang ada betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat dan ekonomi negara. Rasanya, mafia pangan tidak pernah ingin ini terjadi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (27/8).

Ketua Komite II DPD RI M. Aji Mirza Wardana mengaku sejak Andi Amran Sulaiman memimpin Kementan selama hampir lima tahun belakangan, pembangunan sektor pertanian mengalami perubahan yang membanggakan, program yang dijalankan Kementan terbukti memacu peningkatan volume ekspor dan kesejahteraan petani. “Agar capaian ekspor sektor pertanian ini ke depannya terus meningkat dan bertambahnya jenis komoditas yang diekspor, semua komponen harus mendukung program pertanian era saat ini, saya dukung kebijakan – kebijakan



“Begini, kalau ekspor hasil pertanian memang sudah bagus, terus juga untuk di sisi perdagangan, logikanya di dalam negeri stoknya berlimpah,” katanya, Kamis (1/8/2019).

Senator DPD RI dari Sumatera Utara (Sumut) Parliindungan Purba menilai adanya perubahan besar di sektor pertanian yang dibangun Kementan selama ini. Perubahan itu salah satunya adalah peningkatan ekspor hingga menembus pasar negara-negara di dunia. “Yang saya tau pertanian sekarang semakin meroketkan ekspor. Saya juga tau ada peningkatan pada investasi. Maka itu, sudah sewajarnya kita ini bersyukur karena punya menteri pertanian seperti Pak Amran,” ujarnya, Jumat (9/8).

Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraatmaja mengapresiasi peningkatan ekspor yang dicapai Kementan selama hampir lima tahun belakangan ini. Peningkatan ini sekaligus bukti bahwa arah pertanian Indonesia sedang menuju lumbung pangan dunia. “Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus mempercayai angka-angka

peningkatan ekspor yang dikeluarkan BPS (Badan Pusat Statistik),” katanya, Kamis (1/8).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) Suharyo Husen mengaku heran dengan adanya pihak yang tidak suka dengan kinerja ekspor pertanian yang naik dan nercara perdagangan surplus. Pihak tersebut hanya menyoroti sisi impor saja dan kali ini terkait impor singkong atau tapioka, sehingga patut dipertanyakan dibalik sorotannya tersebut. “Dalam hal perdagangan global, ekspor impor itu adalah hal yang lumrah. Impor bukan hal tabu bila kita membutuhkan untuk komoditas tertentu dan sebaliknya kita ekspor komoditas lainnya yang jauh lebih besar karena kita sudah surplus,” ujarnya di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Padahal, lanjut Suharyo, walaupun Indonesia masih impor tapioka, itu nilainya tidak besar karena sudah ketutup berlipat-lipat dari ekspornya sawit. Untuk diketahui Indonesia itu ekspornya jauh lebih banyak, sehingga neraca perdagangan pertanian surplus. **(tim humas)**



MEMPERKUAT POSISI INDONESIA DI MATA INTERNASIONAL

BERBAGAI cara dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menggenjot ekspor pertanian. Salah satunya terus memaksimalkan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi (TI) pada proses bisnis karantina antara lain pertukaran data persyaratan ekspor dan sertifikat elektronik atau e-Cert ke Belanda. "Kita tunjukkan langsung bahwa sertifikat kita dalam hitungan detik sudah dapat diterima negara tujuan. Dan ini untuk memudahkan ekspor kita ke negara tujuan," kata Amran Sulaiman, Menteri Pertanian (Mentan) di Area Kargo Logistik Angkasa Pura II, Denpasar, Bali, Rabu (7/8/2019).

Dia menginstruksikan Badan Karantina Pertanian (Barantan) untuk melakukan harmonisasi dan negosiasi dengan seluruh negara mitra dagang agar dapat menggunakan fasilitas layanan ini. "Sampai dengan sekarang sudah empat negara, yaitu Selandia Baru, Australia, Belanda, dan Vietnam. Baru ada satu negara di Asean, ini yang kita dorong dahulu, seluruh negara ASEAN dan terus lanjut ke negara mitra dagang lainnya," kata Amran.

Menurut Mentan, peningkatan ekspor pertanian akan memperkuat posisi bangsa Indonesia di mata internasional. Sebaliknya, kebijakan impor sangat tidak berpihak pada petani.

Kepala Barantan Ali Jamil menjelaskan, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 19/2019 tentang Akselerasi Ekspor, pihaknya telah melakukan beberapa aksi strategis. Selain penerapan e-Cert dan inline inspektion, juga menggagas Agro Gemilang dan sosialisasi aplikasi petaan komoditas pertanian ekspor atau IMACE pada awal 2019. Di unit pelaksana teknis Karantina Pertanian Denpasar telah membuahkan hasil tercatat peningkatan negara tujuan, pada Juli 2018 sebanyak 40 negara, sedangkan pada Juli 2019 telah menjadi 50 negara, meningkat 25 persen.





Melalui program Agro Gemilang, pada Juli 2018 tercatat telah diikuti 65 eksportir, sedangkan Juli 2019 meningkat menjadi 78 eksportir yang sudah mampu mengekspor, atau peningkatan 11 persen.

Sementara untuk menggenjot ekspor produk pertanian, Barantan telah menyiapkan lima terobosan strategi. Dengan terobosan tersebut diharapkan volume dan nilai ekspor bisa meningkat pada tahun ini mencapai 45 juta ton.

Ali Jamil menerangkan, lima terobosan tersebut, pertama, memberikan kemudahan bagi eksportir dalam perizinan terpadu melalui OSS. "Jika sebelumnya izin baru keluar tiga tahun, tiga bulan, sekarang hanya 3 jam," tandasnya saat Bincang Asik Pertanian bersama FORWATAN (Forum Wartawan Pertanian) di Depok, Jabar, Jumat (9/8/2019).

Terobosan kedua, lanjut Ali Jamil, yakni mendorong generasi milenial untuk menjadi eksportir melalui program Agro Gemilang. Ketiga, pemerintah membuat kebijakan Inline inspection. Keempat, Program I-Mace yang bisa diketahui data sentra komoditas pertanian dan berpotensi ekspor. Terakhir, yakni elektornik sertifikat (E-Cert).

Untuk menggenjot ekspor, Kementan juga mempercepat layanan rekomendasi. Salah satunya meningkatkan ekspor beras jenis tertentu yang tercatat dari tahun ke tahunnya meningkat. Termasuk dalam beras tertentu, contohnya beras premium dengan tingkat kepecahan paling tinggi lima persen, beras medium dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25 persen, beras ketan hitam, dan beras organik dengan kepecahan 25 persen. "Pada 2017, kami mengeluarkan permohonan ekspor sebanyak 13 rekomendasi dengan volume ekspor 473 ton ke Australia, Amerika Serikat (AS), Belgia,

Italia, Jerman dan Singapura," ujar Dirjen Tanaman Pangan Suwandi di Medan, Sumut, Jumat (9/8/2019).

Dia menegaskan, tren permohonan ekspor setiap tahunnya meningkat. Buktinya pada 2018 naik menjadi 59 dengan volume 1.134 ton ke Australia, Israel, AS, Malaysia, Jepang, Turki, Singapura, Hongkong, dan Italia. "Selanjutnya sampai dengan awal Agustus 2019 ini sebanyak 33 rekomendasi ekspor dengan volume 227 ton telah dikeluarkan oleh Kementan," jelas Suwandi.

Sementara itu, Ditjen Tanaman Pangan juga memperkenalkan layanan SARITA (Sistem Agribisnis Tanaman Pangan) sebagai jembatan petani menuju pasar ekspor. Dirjen Suwandi menyampaikan, layanan online ini difasilitasi lengkap berbagai fitur untuk persyaratan ekspor. Layanan itu dapat diunduh <http://aplikasi2.pertanian.go.id/sarita/>. Dengan adanya aplikasi ini, eksportir dan pedagang yang selama ini kesulitan mencari barang di petani menjadi lebih mudah. Aplikasi ini juga bisa menjembatani petani dan produsen benih. "Kami beri akses layanan online kepada petani. Kontak personal eksportir dan pedagang. Sudah kami data, sehingga petani tidak lagi kesulitan kemana mencari eksportir," katanya di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Ditjen Tanaman Pangan juga mensosialisasikan Aplikasi Sistem Rekomendasi Izin Tanaman Pangan (SRITP) yang terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (INSW) menggandeng pelaku usaha dan pihak dari INSW guna mempercepat perizinan baik usaha maupun ekspor tanaman pangan. Karena itu, adanya aplikasi ini sebagai bentuk nyata perbaikan sistem perizinan online. "Gerak cepat Kementan ini pada prinsipnya untuk meningkatkan pelayanan ekspor yang cepat, tepat, akurat, mudah dan transparan," ungkap Kepala



Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Diitjen Tanaman Pangan Lilik Retnowati di Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Selain tanaman pangan, perkebunan juga memiliki kontribusi yang sangat besar dalam peningkatan ekspor. Data menunjukkan komoditas perkebunan berkontribusi sebesar 97,4 persen dari sisi volume terhadap total volume ekspor komoditas pertanian pada 2018, di tahun yang sama perkebunan juga berkontribusi sebesar 96,9 persen dari sisi nilai terhadap total nilai ekspor komoditas pertanian.

Dirjen Perkebunan Kementan Kasdi Subagyono mengatakan, sebagai upaya akselerasi peningkatan daya saing komoditas perkebunan di pasar internasional, pihaknya telah menerapkan lima strategi jitu. Strategi pertama adalah peningkatan produksi pada sentra-sentra pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi melalui perluasan areal baru dan intensifikasi dengan penerapan Good Agriculture Practice (GAP). "Ini senada dengan kebijakan Program BUN500, yang telah kita luncurkan di Palangkaraya beberapa waktu lalu," terangnya.

Strategi kedua, peningkatan mutu pasca panen melalui penerapan GHP, GMP dan GDP, tentunya dengan dukungan sarana prasarana pascapanen yang sesuai dengan karakteristik komoditas ekspor. Ketiga, peningkatan kegiatan partisipasi pada sidang-sidang Internasional dan promosi komoditas perkebunan di acara internasional. Strategi keempat dan kelima yang tak kalah penting, yakni peningkatan diseminasi melalui perluasan dan fasilitasi akses data dan informasi pasar ekspor serta peningkatan capacity building dan sosialisasi regulasi ekspor impor pada pelaku usaha dan pemerintah daerah, serta tentunya peningkatan layanan perkarantinaan.

Selain itu, Dirjen Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengatakan, pemerintah terus mendorong pengembangan subsektor hortikultura seperti buah-buahan, sayur, tanaman hias dan obat masuk ke pasar ekspor dunia. Upaya ini perlu dilakukan mengingat produk pertanian tersebut memiliki potensi jual yang luar biasa. "Terlebih kita sudah memanfaatkan fasilitas kawasan berikat plasma hortikultura dan CSV (pendekatan create share value)," ujarnya dalam Fokus Grup Diskusi di Madiun, Selasa (13/8/2019).

Di tempat terpisah, Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) Kementan giat melakukan uji kimia air, tanah, dan produk hasil pertanian dalam rangka monitoring kualitas pertanian organik, sehingga hasilnya berkualitas ekspor. Sesuai arahan Mentan Amran Sulaiman, ekspor pangan khususnya beras khusus harus semakin besar. Karena itu, Tim BPMPT menugaskan tim turun ke lahan pertanian organik guna mengambil contoh uji.

Petugas pengambil contoh dari BPMPT, Endang Listyawati menjelaskan, parameter uji ditekankan pada mutu kualitas secara kimia antara lain uji kadar residu pestisida dan uji kadar cemaran logam berat seperti unsur Pb dan Cd. Lokasi pertanian organik tersebut telah mendapat sertifikasi pertanian organik. "Untuk produksi Beras Putih dengan hasil 2.531 ton per tahun, Beras Merah 359,07 ton per tahun dan Beras Hitam 30 ton per tahun," jelasnya saat mendatangi lokasi pertanian organik Asosiasi Petani Organik Unit 1 di Desa Sukorejo, Kec Sambirejo, Kab Sragen, Jawa Tengah, Sabtu (24/8/2019).

Sementara untuk meningkatkan ekspor, Balai Besar Pascapanen Balitbangtan Kementan berhasil membuat inovasi penanganan umur simpan pada komoditas pertanian hortikultura produk buah

maupun komoditas pertanian lainnya. Keberhasilan ini di antaranya membuat teknologi pelapisan (coating) yang menggunakan lilin dan bahan polimer. Untuk ujicoba lapang sekaligus implementasi berbagai teknologi yang sudah dihasilkan, BB Pascapanen menggandeng mitra kerjasama CV Sumber Buah Sae yang merupakan eksportir buah lokal di Kedawung, Cirebon, Jabar. "Teknologi pemasakan buah (ripening, red) serta teknologi lainnya adalah penekanan alat buah menggunakan hot water treatment, penggunaan ozon untuk pencucian buah maupun teknologi penyimpanan terkontrol (Modified Atmosphere Storage, red)," ujar Kepala BB Pascapanen Dr Prayudi Syamsuri, Minggu (4/8/2019).

Balai Besar Pascapanen Balitbang juga mendorong ekspor mangga menembus pasar secara kompetitif. Dengan produksi mangga rata-rata mencapai 1,8 juta ton per tahun, Indonesia merupakan eksportir terbesar kelima di dunia yang dapat memenuhi permintaan pasar internasional sepanjang tahun. "Karena itu, kami merekomendasikan penggunaan teknologi Hot Water Treatment (HWT) dan formula pelilinan. Teknologi HWT dan formula pelilinan telah terbukti mempertahankan mutu buah selama pengiriman ekspor dengan tingkat kerusakan kurang dari 10 persen," ujar Kepala Balai Besar Pascapanen Prayudi Syamsuri di Bogor, Kamis (8/8/2019). (tim humas)





MENGALIR DERAS *Bak Air Terjun*

SEJAK lima tahun belakangan, laju ekspor pertanian Indonesia tak pernah berhenti. Bahkan mengalir dengan deras bak air terjun. Salah satunya pada Selasa (6/8/2019), Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali melepas ekspor produk pertanian sebanyak 10,5 ribu ton yang nilainya mencapai Rp1,1 triliun langsung di tempat pemeriksaan fisik terpadu CDC Banda, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Produk pertanian yang diekspor ini berjumlah 80 jenis komoditas yang dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta.

Amran menegaskan, ekspor tersebut merupakan bentuk Revolusi Mental di sektor pertanian, sehingga hasil ekspor naik 100 persen dan investasi juga melonjak 100 persen. Dengan demikian, total kenaikan ekspor rata-rata 2,4 juta ton per tahun dan tercatat sejak pemerintahan Jokowi-JK, ekspor naik 9 juta ton. Tahun 2013, total ekspor hanya 33 juta ton, namun pada 2018 mencatat nilai tertinggi, yakni 42,5 juta ton dan pada 2019 ditargetkan naik minimal 45 juta ton.

Sementara itu, salah satu produk primadona komoditas asal Indonesia di Mesir, yakni kopi dan kakao. Karena itu, pemerintah melalui Kementan akan menggelar kegiatan Agri Expo 2019 pada 8-10 September 2019 di Kota Cairo. "Kegiatan ini diinisiasi oleh KBRI Cairo yang dilatarbelakangi oleh semakin diminatnya komoditas perkebunan terutama produk kakao di pasar Afrika

terutama Mesir," kata Amran.

Secara garis besar, lanjut Mentan, Indonesia sampai saat ini memang belum memiliki kerjasama FTA dengan Mesir. Tapi, posisi ini sangat berpengaruh pada pasar produk kakao yang berkontribusi sebesar 13 persen dari seluruh volume yang ada. Sedangkan untuk komoditas yang sama, kakao Malaysia memiliki kontribusi sebesar 35,6 persen.

Di tempat terpisah, Teluk Bayur, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (1/8/2019), Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan lepas ekspor komoditas pertanian berupa olahan kelapa asal Sumbar sebanyak 108,4 ton ke mancanegara. "Dari tujuh komoditas pertanian yang diekspor, alhamdulillah ada ekspor tiga produk olahan dari komoditas kelapa," ujar Ali Jamil, kepala Barantan saat melepas ekspor.

Berikutnya, pada Jumat (2/8/2019), Barantan kembali melepas 15,5 ribu ton cangkang kelapa sawit senilai Rp15,5 miliar tujuan Jepang melalui Pelabuhan Industri Buton, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Riau. "Dari catatan lalu lintas kami, pertumbuhannya (cangkang sawit, red) diprediksi sekitar 40 persen dibanding tahun lalu. Insya Allah kita dorong agar dapat terus meningkat," kata Ali Jamil.

Pada hari yang sama, Jumat (2/8/2019), Kementan juga mengekspor sebanyak 252 ton dari total komitmen

2.760 ton bawang merah ke Thailand dan Singapura dari Gudang Marunda Tarumajaya Bekasi, Jawa Barat. Bawang merah yang diekspor PT Karya Tani Semesta adalah varietas Super Philips yang dihasilkan petani di Kabupaten Bima dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Diketahui selama ini jenis bawang merah tersebut banyak diminati pasar luar negeri. "Pesan dari Mentan, dorong ekspor, dorong ekspor! Kita lihat di sini truk kontainer berjajar panjang sekali. Ini semua akan kita ekspor," ujar Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto saat melepas ekspor.

Di tempat terpisah, Direktur Buah dan Florikultura Kementan Liferdi Lukman melepas ekspor bunga Suji *Dracaena* menuju negara Asia dan Eropa, Jumat (2/8/2019). Pelepasan ini digelar Kementan di rumah Poktan Alamanda di kawasan Selabintana, Sukabumi, Jawa Barat.

"Sementara ini, kita hanya melepas ke Rusia sekitar 1,3 ton, dan ke Oman 1,3 ton. Tapi sebelumnya kita juga sudah melepas ke Dubai, Qatar, Tiongkok, Vietnam, Malaysia dan negara-negara lain di Benua Amerika," ujarnya.

Peningkatan ekspor terjadi pula pada tanaman pangan untuk beberapa komoditas, contohnya seperti kedelai, ubikayu, dan kacang hijau. Faktanya, merujuk data BPS, peningkatan signifikan ekspor kacang hijau Semester I/2019 naik 114 persen, sebanyak 1.681 ton dibandingkan pada 2018 dan 2019 mencapai 3.489 ton atau senilai Rp4,5 miliar, sedangkan pada 2018 hanya 1.628 ton atau senilai Rp2,6 juta miliar. "Sampai dengan bulan ini kacang hijau berhasil masuk ke beberapa negara seperti Taiwan, Tiongkok, Filipina, Vietnam, dan Indi," kata Direktur Tanaman Pangan Kementan Suwandi saat rapat koordinasi Luas Tambah Tanam di Semarang,



Jateng,
K a m i s
(1/8/2019).

Sementara itu beras organik dalam negeri juga semakin diminati pasar ekspor, sehingga volume ekspornya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Buktinya, ekspor pada 2016 hanya tercatat 81 ton, tapi pada 2018 Kementan telah menerbitkan rekomendasi ekspor 143 ton beras organik. "Kemudian, sampai dengan Juni 2019 ini sudah 252 ton beras organik yang telah direkomendasikan untuk menembus pangsa pasar luar negeri. Kami optimistis diperkirakan akan terus bertambah sampai dengan akhir tahun ini," ujar Suwandi saat meninjau lahan padi di Kecamatan Telang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (2/8/2019).

Suwandi mengatakan, antara 2015-2019 Indonesia sudah berhasil menghentikan impor beras Japonica hingga menjadi nihil. Padahal sebelumnya tercatat impor terakhir beras Japonica di tahun 2014 sejumlah 1.079 ton senilai Rp18 miliar. "Tapi kini Indonesia bahkan termasuk dalam deretan penghasil beras Japonica disamping Jepang, Amerika Serikat, Prancis, Korea Selatan dan Thailand," jelasnya di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Ekspor beras Indonesia selama ini tidak hanya didominasi beras organik saja. Ternyata seperti beras ketan hitam pun secara konsisten ekspor, terutama ke Singapura dan Hongkong.

Untuk jagung, Suwandi menyebutkan, keberhasilan budidaya jagung di era pemerintahan Jokowi-JK tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor jagung pipil. Namun demikian, kini Indonesia juga mampu mengekspor serbuk tongkol jagung (corn cobs meal) sehingga bernilai jual tinggi. "Pengiriman perdana serbuk tongkol jagung yang dipadatkan ke Korsel pada Maret 2019 sebanyak 300 ton atau 75 persen dari total permintaan Korea sebesar 400 ton. Harga jual ekspornya sekitar Rp1,9 juta per ton atau total setara Rp570 juta," ujarnya di Jakarta, Senin (5/8/2019).

Suwandi juga menyebutkan, komoditas ubi jalar semakin diminati pasar ekspor, terutama Jepang dan Korsel, sehingga terjadi peningkatan volume ekspor dari tahun ke tahun. "Buktinya, di Korsel dan Jepang, saat ini ubi jalar menjadi tren sebagai salah satu bahan pangan sehat, karena memiliki komposisi gizi yang

baik,” katanya saat Rapat Koordinasi Program Upaya Khusus (UPSUS) se-Jabar di Bandung, Selasa (6/8/2019).

Talas Indonesia ternyata disukai warga Jepang. Salah satunya talas yang dibudidayakan petani di Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah menembus pasar Jepang, varietasnya *Colocasia esculenta* var *antiquorum* atau lebih dikenal Talas Jepang Satoimo atau Taro Potato.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan Gatut Sumbogodjati menyatakan, beras hitam Indonesia sudah mulai dilirik pasar Amerika Serikat. Pada 2018 untuk pertama kali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah mengekspor beras hitam ke Amerika Serikat sebanyak 20 ton dengan nilai mencapai Rp 800 juta.

Di lain pihak, dalam beberapa tahun terakhir ini, Kementan fokus dalam peningkatan ekspor hortikultura, termasuk benih buah, sayuran, florikultura dan tanaman obat. “Berdasarkan data Ditjen Hortikultura, izin pengeluaran benih tanaman florikultura (SIP) yang dikeluarkan sepanjang 2018 sampai Juni 2019 tidak kurang dari 2 juta kg (biji). Sebanyak 200 juta tanaman sudah diekspor ke berbagai negara seperti Australia, Canada, Chile, Inggris, India, Italia, Jerman, Jepang, Korea, Kuwait, Malaysia, Mesir, Netherland, Norwegia, New Zealand, Phillipine, Pakistan, Rusia, Singapore, Spanyol, Thailand, Taiwan, USA, Vietnam dan lain - lain,” kata Direktur Perbenihan Hortikultura, Sukarman.

Di sisi lain, Karantina Pertanian Semarang telah mensertifikasi bungkil biji kapuk sebanyak 100 ton senilai Rp343 juta dengan tujuan Korsel. Pengiriman komoditas ini setelah dinyatakan sehat dan aman sesuai persyaratan negara tujuan ekspor melalui Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, (24/7).

Untuk ekspor pisang, berdasarkan data 2017, volume konsumsi pisang di Jepang sebesar 18,5 kilogram per rumah tangga yang beranggotakan dua orang atau lebih. Atase Pertanian KBRI Tokyo Sri Nuryanti menyebutkan, pada tahun lalu Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-10 sebagai eksportir pisang ke Jepang, dengan nilai ekspor sebesar USD 1,67 juta. Padahal pisang asal Indonesia baru mulai menembus pangsa pasar Jepang pada 2015.

Selain Jepang, pisang Indonesia juga menysasar Malaysia. Pada Senin, (5/8), Kementan melakukan ekspor sejumlah 18 ton pisang Tanduk dan 9,8 ton pisang Kepok di kawasan Puspa Agro Sidoarjo, Jawa Timur.

Kementan melalui Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya juga melepas ekspor pakan ternak ke Timor Leste sebanyak 40 ton senilai Rp229 juta di PT Charoen Pokphand Indonesia, Sidoarjo, Selasa (27/8/2019). Pada hari yang sama, Barantan melepas perdana ekspor salak madu dari Deli Serdang ke Thailand di Kualanamu, Medan, Sumut. Pada Sabtu (17/8/2019), Barantan juga melepas ekspor buah Semangka segar asal Rote sebanyak 2 ton ke Timor Leste.



Di Kantor Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Kamis (29/8/2019), Barantan melepas 593 kg Sarang Burung Walet (SBW) ke Hongkong dengan total nilai sebesar Rp14,8 miliar. Selain itu, Kementan mencatat rekomendasi ekspor produk peternakan sejak 2015 sampai semester I 2019 telah menyentuh nilai Rp38,39 triliun. Kontribusi terbesar untuk ekspor peternakan datang dari kelompok obat hewan dengan jumlah transaksi senilai Rp26 triliun.

Terdapat lebih dari 90 negara yang menjadi tujuan ekspor utama obat hewan buatan Tanah Air.

Sementara Kementan tak henti-hentinya mendorong ekspor komoditas tanaman pangan. Dengan menggandeng Food and Agriculture Organization (FAO), Kementan sedang mengembangkan padi organik di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Kalbar) dengan Malaysia dan Brunei Darussalam untuk tujuan ekspor. “Di daerah perbatasan Kalbar mulai kita kembangkan padi organik,” ujar Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Gatut Sumbogodjati di Jakarta, Sabtu (17/8/2019).

Ditjen Tanaman Pangan juga tengah meningkatkan ekspor kacang hijau. Gatut pada Minggu (25/8/2019) menjelaskan, ekspor kacang hijau pada umumnya mengikuti panen raya, mulai meningkat pada bulan Agustus-September. Berdasarkan volume ekspor 7 komoditas utama produk segar tanaman pangan 2014-Juni 2019. Ekspor Kacang hijau menduduki peringkat kedua (19,82 persen) setelah ekspor jagung (63,34 persen).

Sedangkan giat ekspor produk pertanian dengan menggali produk-produk ekspor baru dan mendorong tumbuhnya eksportir milenial menjadi terobosan yang dilakukan Kememtan saat ini. “Semangat Mentan Amran Sulaiman dalam menggenjot ekspor produk pertanian perlu kita dukung penuh. Upaya strategis peningkatan dan percepatan ekspor komoditas pertanian menjadi modal bagi bangsa Indonesia. Selain itu kita beruntung bahwa bangsa ini dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, terutama hasil pertanian,” ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi, Jakarta, Rabu (7/8/2019). (tim humas)



Nilai Ekspor Pertanian

(Periode Januari - Juni 2019)



Sumber: BPS

*Angka dalam juta dolar AS

KOMODITAS



Tanaman obat
(aromatik dan rempah-rempah)



Kopi



Sarang
burung walet



Buah-buahan



Cengkeh



Rumput laut



Lada Putih



Hasil hutan bukan kayu



Tembakau

"Kalau sudah bisa ekspor, maka petani tidak akan takut hasil panen tidak terjual. Karena ada pasar dalam dan luar negeri."

- Andi Amran Sulaiman -
Menteri Pertanian

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) tidak hanya sebatas meningkatkan produksi pangan khususnya padi, namun juga hingga menjamin agar harga jual yang diperoleh petani pada posisi tinggi agar menikmati keuntungan. Karena itu, penanganan pascapanen yang baik harus dengan sistem pengelolaan yang terstruktur, salah satunya melalui pembentukan Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T).

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan Kementan Gatut Sumbogodjati mengatakan, SP3T lahir atas dasar keprihatinan. Selama ini petani padi banyak yang tidak menikmati hasil panennya secara maksimal karena banyak dijual dalam bentuk gabah kering panen.

"Bahkan, ada yang dijual secara tebasan ketika gabah masih ada di lahan. Tentunya kami tidak diam begitu saja dengan kondisi tersebut. Kami berikan bantuan alsintan (alat mesin pertanian) seperti combine harvester, vertical dryer, RMU, dan mesin packing untuk UPJA (unit pengelolala jasa alat mesin pertanian)," jelasnya di Jakarta, Minggu (11/8/2019).

Sementara itu, Dosen Teknologi Agroindustri Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Adrinoviarini optimistis Indonesia telah menjadi negara berdaulat pangan. Ini bukan sekadar isapan jempol karena melihat peluang pertanian Indonesia yang sangat besar. Apalagi pemerintah telah berupaya sekeras mungkin untuk mewujudkannya. Sebagai hasil dari seluruh pemangku kebijakan telah bersinergi menyelesaikan persoalan pangan di Indonesia.

"Semua pihak bersinergi dalam menjaga persoalan pangan ini, cita-cita Indonesia menjadi



bangsa yang berdaulat secara pangan (*food sovereignty*) melalui produksi lokal untuk pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik sesuai budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan segera terwujud," katanya, Selasa (13/8/2019).

Di lain pihak, Kementan sangat fokus mewujudkan ketahanan pangan nasional, salah satunya didukung dari ketahanan pangan keluarga. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan program Kementan untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kementan mulai mengembangkan Program KRPL sejak 2010 hingga saat ini tersebar di 20.000 desa di 34 provinsi, salah satunya Kabupaten Bima, NTB. Salah seorang penyuluh Dinas Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bima Abdul Rachman menyatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima sangat mengapresiasi program KRPL Kementan. "Soalnya, dengan program ini masyarakat dapat memanfaatkan lahan kosong atau pekarangan menjadi produktif, sehingga ketersediaan pangan bisa dicukupi sendiri dan bahkan memberikan tambahan pendapatan yang cukup besar," katanya di Bima, Rabu (28/8/2019).

Sedangkan Direktorat Pangan dan Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendukung riset yang dilakukan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pascapanen Pertanian, Kementan terkait nanoteknologi. Aplikasi nanoteknologi dipastikan dapat mendukung pembangunan di bidang pangan dan pertanian, yakni mengatasi stunting.

"Nanofortifikasi yang telah dikembangkan di BB-Pascapanen dapat diaplikasikan untuk mengatasi stunting yang sejalan dengan program prioritas biofortifikasi dan fortifikasi pangan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, red) 2020-2024," diungkapkan Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Anang Noegroho dalam rapat penyusunan rancangan awal RPJMN 2020-2024 bidang pertanian di Surabaya, Jawa Timur pada Senin (29/7/2019).

PANGAN TERJAGA, PETANI TERJAMIN



Peneliti Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian Sri Yuliani yang juga sebagai narasumber memaparkan pengenalan nanoteknologi, aplikasinya pada bidang pangan dan pertanian, status pengembangan nanoteknologi Indonesia di dunia, aspek keamanan nanoteknologi, perkembangan riset nanoteknologi di Balitbangtan serta fasilitas laboratorium nanoteknologi yang dimiliki Balitbangtan.

Selain itu, seiring dengan beberapa wilayah di Indonesia yang rentan bencana alam dan dampak musim hujan atau kemarau ekstrem (Fenomena El Nino dan La Nina), Kementan meminta kepala daerah mengalokasikan APBD untuk cadangan pangan. "CBPD sebagai instrumen strategis menjaga stabilisasi harga pangan dan memenuhi stok pangan untuk menjamin akses pangan masyarakat pasca bencana, kerawanan pangan dan kondisi darurat lainnya," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan Agung Hendriadi, dalam pertemuan koordinasi Cadangan Beras

Pemerintah Daerah (CBPD) Wilayah Timur di Bali, Senin (19/8/2019).

Di tempat terpisah, Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi memberikan jurus untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan kepada petani di Kabupaten Garut, Jawa Barat. "Jurus pertama pada saat harga jatuh, petani jangan risau cari solusi, jangan salahkan kondisi," ujarnya dalam kunjungan kerja Kementan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi XI DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka pengawalan BPK penyerahan bantuan sarana pertanian dan perikanan kepada Kelompok penerima bantuan di Garut, Rabu (7/8/2019).

Jurus kedua, lanjut Suwandi, petani yang sudah tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) harus naik kelas menjadi Koperasi, Badan Usaha Masyarakat dan berkorporasi. **(tim humas)**



TINGKATKAN PRODUKSI PANGAN, FOKUS TATA LAHAN RAWA



KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) melirik potensi lahan rawa yang luar biasa besar untuk memenuhi kebutuhan pangan yang tengah dihadapkan adanya alih fungsi lahan.

Melansir data Badan Litbang Pertanian, Kementan, Indonesia memiliki potensi lahan rawa untuk kegiatan pertanian sekitar 9,9 juta hektare (ha). Angka tersebut sangat menggiurkan jika dibandingkan dengan total lahan sawah yang digarap petani di seluruh Indonesia sekitar 12,65 juta ha.

"Jadi, sudah sepatutnya kita mulai mengelola lahan rawa dengan baik dan saat ini pemerintah serius dalam menata lahan rawa ini," ujar Kepala Sub Direktorat Padi Irigasi dan Rawa, Direktorat Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Mulyono di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Ia menjelaskan, jika mengelola lahan rawa ini dengan baik, dipastikan ke depan Indonesia memiliki lahan pertanian yang cukup luas, sehingga bisa menopang kebutuhan pangan dalam negeri. "Dengan demikian, kita bisa menggapai cita-cita menjadi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada 2045," jelasnya.

Terpisah, Purwanto, petani dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kolam Kiri Dalam I, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan (Kalsel) mengaku dirinya dan para petani yang lain yang tergabung dalam gapoktan sangat merasakan bantuan pemerintah untuk menata saluran-saluran air yang ada di persawahan. Alhasil, sangatlah membantu petani dalam meningkatkan produktivitas. "Tahun ini kami mendapatkan alokasi bantuan untuk sawah di kelompok tani kami seluas 300 ha," akunya.

Sementara memasuki puncak kemarau saat ini, Kementan terus mengupayakan langkah untuk memitigasi. Curah hujan yang masih rendah menjadi tantangan tersendiri bagi para petani dalam bercocok tanaman.

Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Suwandi menyatakan, sebagai langkah mitigasi, Kementan telah mengupayakan langkah antisipasi. Ini di antaranya pipanisasi, pompanisasi dan percepatan tanam padi gogo sawah dengan Sistem Tabur Benih Langsung (TABELA) untuk daerah potensial, serta mengoptimalkan tanam padi di lahan rawa.

"Di musim kemarau ini kita harus mengoptimalkan potensi lahan rawa lebak, khususnya wilayah yang belum mendapatkan bantuan Program SERASI (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani). Karena kita ingin optimalkan di lahan rawa ini untuk menambah luas tanam," ujarnya saat memberikan sambutan pada Rakor Luas Tambah Tanam di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (27/8/2019).

Menurut Suwandi, rawa yang biasanya airnya tinggi, maka pada musim kemarau airnya surut. Dengan demikian, kondisi sekarang merupakan saat yang tepat petani untuk segera menanam di rawa.

Tentunya, sambungnya, Kementan akan berkomitmen memberikan bantuan, setiap Kepala Dinas yang hadir diminta segera mendata Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL). "Ini agar segera diusulkan, kami akan bantu benihnya segera dan juga siapkan Brigade Alsintan jika memang dibutuhkan untuk mempercepat pertanaman," ujar Suwandi.

Perlu diketahui, berdasarkan data Dinas Pertanian Sumsel, potensi lahan rawa di Sumsel sebesar 200 ribu ha dan sudah ditanami 167 ribu ha. Artinya masih ada potensi lahan rawa yang bisa digenjut lagi. **(tim humas)**



MENCETAK EKSPORTIR DARI SANTRI TANI MILENIAL

DI TENGAH era ekonomi digital saat ini, Kementerian Pertanian (Kementan) melihat adanya potensi besar yang bisa dikembangkan di lingkungan pondok pesantren (ponpes). Seluruh sumberdaya, termasuk para santri ini harus dilatih semaksimal mungkin agar sasaran-sasaran tersebut bisa tercapai.

“Pesantren menjadi potensi untuk menciptakan regenerasi petani, melalui program Santri Tani Milenial. Kita dorong generasi santri untuk terjun ke pertanian. Sekarang pertanian sudah canggih, alat-alat pertanian sudah banyak tersebar seperti alat mengolah, menanam dan panen,” ungkap Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian Prof Dr Dedi Nursyamsi, Jumat (23/8/2019).

Dia mengatakan, santri-santri ini nantinya akan diberikan pembekalan ilmu dan pendampingan yang komprehensif, termasuk kegiatan budidaya, teknologi pertanian, pasca panen dan pemasaran. “Kita akan dorong mereka bertani dengan teknologi digital, karena era milenial dikenal sebagai era yang serba digital, serba cepat, dan mudah diakses,” ujarnya.

“Kita *kan* sudah berjalan dari awal 2019 program ini, yaitu dengan Kelompok Tani Santri Milenial (KSTM). Para santri ini nantinya setelah keluar dari ponpes memiliki lifeskill dan syukur-syukur bisa menjadi job seeker dan job creator hingga jadi eksportir milenial,” tutur Dedi.

Dia meyakini bahwa eksportir milenial bisa saja munculnya dari jebolan ponpes. Ini dikarenakan penanaman kepribadian, agama, dan kemandirian dibina sejak dini, sehingga akan mengantarkan jiwa siap untuk mengembangkan potensi. Lingkungan dan ekosistem di pesantren sangat mendukung. “Di beberapa pondok yang memiliki lahan yang luas, sudah banyak santrinya dibekali untuk berternak, jadi lebih mudah untuk membimbing dan membinanya,” ujar Dedi.

Di tempat terpisah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menggandeng Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) merealisasikan Program One Pesantren One Product (OPOP) dengan melibatkan SMK berbasis pondok pesantren. Program ini secara resmi telah launching Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawasa di Kampus Unusa, Kamis (22/8/2019).

Khofifah menilai ke depannya program ini sangat tepat untuk dikolaborasikan dengan dengan Program Santri Tani Milenial yang tengah dijalankan Kementan. Jika dimasukkan pada program Santri Tani, maka akan masuk pada Program Petik, Olah, dan Jual. “Artinya setelah dipetik ada olahannya, setelah diolah ada pengemasannya dan setelah itu bagaimana akses pasarnya,” ujarnya.

Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unusa, sekaligus koordinator OPOP Training Center Mohammad Ghofirin mendukung berbagai program dan kebijakan terobosan Kementan dalam pengembangan generasi muda. “Kami memiliki Program OPOP (One Pesantren One Product) yang bisa bersinergi dengan program Santri Milenial Kementan,” ujarnya dalam acara sinergi Program OPOP di Hotel Ibis Surabaya, Jatim, Sabtu (24/8/2019).

Ghofirin menjelaskan, selain dengan Kementan pihaknya juga akan menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim. Kerja sama ini meliputi pembahasan rumusan dan konsep implementasi.

“Ada tiga pilar yang harus diimplementasikan dalam program OPOP. Masing-masing kategori Santripreneur, Pesantrenpreneur dan Alumni melalui Sosiopreneur. Program ini juga bertujuan menyempurnakan program SMK Mini pada masing-masing pesantren,” katanya. **(tim humas)**

DEVON 1, KEDELAI FUNGSIONAL TINGGI MANFAAT



DI dalam kedelai, senyawa yang memiliki manfaat bagi kesehatan adalah isoflavan. Isoflavan adalah nutrisi yang terkandung dalam biji kedelai. Menurut ahli kesehatan, senyawa isoflavan pada kedelai bermanfaat mencegah beberapa penyakit seperti kardiovaskular, osteoporosis, menurunkan kadar kolesterol dan dapat mencegah kanker.

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Litbang Pertanian (Balitbangtan) telah menemukan kedelai yang mengandung isoflavan tinggi, yaitu kedelai varietas Devon 1. Kedelai yang dirakit di Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi (Balitkabi) ini mengandung isoflavan yang lebih tinggi (2.220 µg/g) dibanding varietas Wilis (1.854 µg/g) dan Anjasmoro (1.457 µg/g) yang sekarang banyak ditanam petani. "Apalagi terhadap kandungan isoflavan kedelai impor yang jauh di bawahnya," urai Muchlis Adie, peneliti senior Balitkabi.

Varietas Devon 1 ini juga dikenal berdaya hasil tinggi, yang mampu memproduksi 3,09 t/ha dengan rata-rata hasil 2,75 t/ha. Angka ini lebih tinggi dari produktivitas kedelai di tingkat petani yang dewasa ini baru mencapai 1,3 t/ha. Lompatan peningkatan produktivitas kedelai ini sangat berpeluang untuk meningkatkan produksi kedelai nasional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Dr Yuliantoro Baliadi, Kepala Balitkabi menyampaikan, kedelai Devon 1 prototipe generasi baru rakitan anak bangsa ini optimistis akan diterima luas oleh pasar, khususnya di era masyarakat demam makanan sehat dan bergizi serta jelas memiliki nilai manfaat. "Nilai jual dan penerimaan pasar diyakini cepat naik karena kandungan estrogen nabati (isoflavan, red) dengan multi manfaat kesehatan anti aging dan penundaan menopause, misalnya. Hasil olahan Devon1 berupa tempe, tahu, kecambah, susu juga buktikan lebih baik dan lebih disukai oleh konsumen," terangny. **(tim humas)**

TAHUKAH Anda bahwa mie atau pasta spageti juga dapat dibuat dari beragam bahan pangan lokal Indonesia seperti singkong dan sagu. Ini dengan sedikit sentuhan teknologi, sekarang industri pangan pun tengah melirik peluang ini. Bahkan rencananya, akan menembus pasar Eropa.

"Pengembangan mie dan spageti berbahan baku sagu merupakan inovasi baru dalam meningkatkan daya guna pati sagu dan menjadikan produk turunan sagu memiliki daya saing tinggi di pasar global.

Apalagi kebutuhan terhadap jenis pangan baru meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia, kesadaran untuk hidup sehat, adanya perubahan gaya hidup dan bahkan perubahan iklim," tutur Direktur PT Embrio Biotekindo, Widya Winarno.

Karenanya, PT Embrio Biotekindo bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) melalui Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian (BB Pascapanen) mengembangkan olahan tepung sagu. "Nantinya, spageti ini akan diformulasikan dengan sumber protein nabati untuk meningkatkan kandungan proteinnya," ujar Widya.

Selain PT Embrio Biotekindo, beberapa mitra lain yang tertarik bekerja sama terkait olahan pangan lokal ini di antaranya Pesantren Alquran Wal Hadis dalam pengembangan olahan mie sagu, serta Kelompok Tani Setia pada pengolahan Mi Nusantara. "Sagu ini diformulasi secara optimal dan diproses menjadi spageti dengan aplikasi teknologi ekstrusi yang terkendali dengan cermat. Spageti sagu tersedia dalam kondisi segar ataupun kering," tutur Peneliti BB Pascapanen, Endang Yuli Purwani.

Endang menambahkan, spageti sagu kering memerlukan waktu rehidrasi sekitar 8-10 menit dengan elastisitas sedang dan tekstur lembut. Karenanya, Spageti sagu dapat dikembangkan untuk segmen pelanggan hotel, restoran, kafe, rumah tangga yang peduli terhadap gaya hidup sehat dan industri yang menghasilkan produk diet khusus. **(ega/tim humas)**

SPAGETI SAGU SIAP TEMBUS EROPA



GENJOT KOORDINASI LINTAS SEKTORAL, KEBUT PENINGKATAN TANAM PAJALE

KOORDINASI lintas sektoral digenjut untuk mempercepat peningkatan luas tambah tanam padi, jagung, kedelai (pajale) dan kualitas data. "Untuk meningkatkan luas tanam, harus dilakukan identifikasi di lapangan, yakni lahan-lahan yang bisa ditanam dan selanjutnya melakukan Gerakan Tanam bersama petani," ujar Suwandi, dirjen Tanaman Pangan Kementan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Luas Tambah Tanam dan Penguatan Data Luas Tanam Pajale di Depok, Jawa Barat (Jabar), Selasa (20/8/2019).

Dengan begitu, sambungnya, tanaman akan dipanen beberapa bulan lagi saat masuk musim penghujan dan mulai tanam lagi. Ini akan menambah income petani di saat musim kemarau. "Dalam upaya meningkatkan luas tanam, Kementan juga melakukan koordinasi dengan TNI yang mendukung penuh gerakan di lapang mulai dari tanam, serap gabah, dan lainnya," ujar Suwandi.

Terkait dengan data, kata dia, sumbernya data satu pintu, yakni BPS (Badan Pusat Statistik). Meski demikian, BPS dan Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementan serta dinas pertanian dan penanggung jawab Program Upaya Khusus (Upsus) perlu menyamakan persepsi, sehingga pengentrian data luas tanam benar-benar tercatat. "Jangan sampai kita sudah tanam, tapi tidak tercatat di mana pun," tandas Suwandi.

Sementara pada musim kemarau saat ini pertanaman jagung meluas di Indonesia. Apalagi telah didukung melalui embung dan infrastruktur pengairan lainnya. Kondisi inilah yang berdampak langsung pada laju produksi jagung secara nasional. Bahkan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa produksi dan pasokan jagung nasional tahun ini aman dan terkendali. Maka itu, Indonesia tidak perlu impor karena persediaan jagung di Bulog sangat melimpah.

"Produksi jagung melimpah di tengah musim kering di lahan pertanian di Indonesia. Saya juga sudah bilang ke Bulog, bagi petani dan peternak yang membutuhkan jagung bisa meminta ke gudang bulog," kata Amran, Sabtu (24/8/2019).

Ketua Umum Dewan Jagung Nasional (DJN) Fadel Muhammad mengatakan, produksi jagung nasional sudah mampu bersaing di pasar regional, sehingga jangan jika kalah saing dengan impor. "Indonesia sudah bisa ekspor (jagung, red) ke ASEAN, seperti pernah ke Filipina dan Malaysia. Produksi jagung juga dipacu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya, Kamis (22/8/2019).

Program penanaman jagung juga turut mengikutsertakan Kementan dalam pemberantasan narkoba. Ini melalui kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kepala Seksi Pemanfaatan Benih, Ditjen Tanaman Pangan Endy Fachrial menyatakan, program bantuan peningkatan produksi jagung kerja sama dengan BNN telah terealisasi pada 21 Agustus 2019 di Kabupaten Bireun, Aceh. Kementan dan BNN saling bersinergi memberantas



penyalahgunaan narkoba. "Jadi salah satu langkah nyata dengan melakukan penanaman jagung di lahan yang biasa sebelumnya ditanam tanaman terlarang (ganja, red)," ujarnya di Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Selain jagung, kedelai lokal juga didorong karena memiliki kualitas dan nilai gizi yang lebih tinggi. Petani di beberapa daerah masih antusias menanam kedelai lantaran kebutuhan kedelai tidak pernah berkurang. Terbukti, di beberapa wilayah saat ini sedang memasuki musim panen kedelai. Salah satunya di Desa Banyumas Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat (2/8/2019) dilaksanakan panen kedelai bersama untuk kedelai Varietas Devon I seluas 1 hektare (ha).

Direktur Aneka Kacang dan Umbi (Akabi) Amiruddin Pohan mengatakan, secara nasional, pada 2019 ini Kementan mengalokasikan bantuan budidaya kedelai seluas 1 juta ha. Ini membuktikan Kementan berkomitmen mewujudkan swasembada kedelai. "Kalau produksi kedelai kita melimpah, kita tidak akan ketergantungan lagi ke negara lain," tegasnya di Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Di Kabupaten Cianjur, Jabar, Kementan terus memacu perluasan lahan dan peningkatan produksi tanaman kedelai. "Di Cianjur ini, kami menyalurkan benih kedelai

bersertifikat total seluas 3.005 ha, rinciannya monokultur seluas 2.095 ha dan tumpangsari kedelai-jagung seluas 910 ha," ujar Amiruddin di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), Kementan juga mendukung petani memanfaatkan lahan yang biasanya ditanam bawang merah untuk ditanami kedelai. "Cita-cita kita kedelai bisa swasembada pada 2020," kata Amiruddin di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Kementan juga memiliki program gerakan olah tanah dan tanam kedelai di lahan eks galian pasir, sehingga galian pasir disulap menjadi lahan lahan kedelai yang cukup produktif. Kegiatan ini dilakukan di Desa Cibulan, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jabar, namun sudah dilakukan sejak 2018 lalu seluas 100 ha.

Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Tanaman Pangan Ugi Sugiharto menjelaskan, kedelai yang ditanam di lahan eks galian pasir tersebut produktivitasnya bisa mencapai 1,2 ton hingga 1,3 ton/ha. "Saat ini kami bersama lima kelompok tani di Desa Cibulan juga melakukan kegiatan olah tanah dan tanam kedelai di lahan eks galian pasir seluas 200 ha," jelasnya, Rabu (28/8/2019).
(tim humas)

KENDALIKAN OPT, KUATKAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN

SELAIN gerakan pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), Kementerian Pertanian (Kementan) juga berupaya menguatkan kelembagaan perlindungan tanaman pangan. "Himpitan akibat perubahan iklim harus diwaspadai dan menjadi kekuatan positif. Itu semangatnya," kata Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Kementan Edy Purnawan dalam rapat koordinasi (Rakor) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Tanaman Pangan di Jakarta pada Senin (19/8/2019).

Dia menambahkan, akselerasi sangat diperlukan pada kelembagaan perlindungan tanaman untuk mengawal pemenuhan kebutuhan manusia, terutama pangan. "Penguatan setiap simpul proses harus diidentifikasi dengan baik dan dieksplorasi menjadi upaya positif," ujarnya.

Kepala Subdirektorat Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT Ditjen Tanaman Pangan Batara Siagian mengatakan, strategi penguatan kelembagaan perlindungan yang saat ini dikembangkan melalui penataan kapasitas kelembagaan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH). "Kemudian penataan regulasi perlindungan sebagai payung hukum operasional dan peningkatan koordinasi," jelasnya.

Perwakilan IPB Abdul Munif menyatakan, IPB memberikan dukungan atas upaya Kementan dalam penguatan kelembagaan perlindungan tanaman. Penguatan kelembagaan perlindungan tanaman ini perlu dilakukan, baik penguatan melalui regulasi

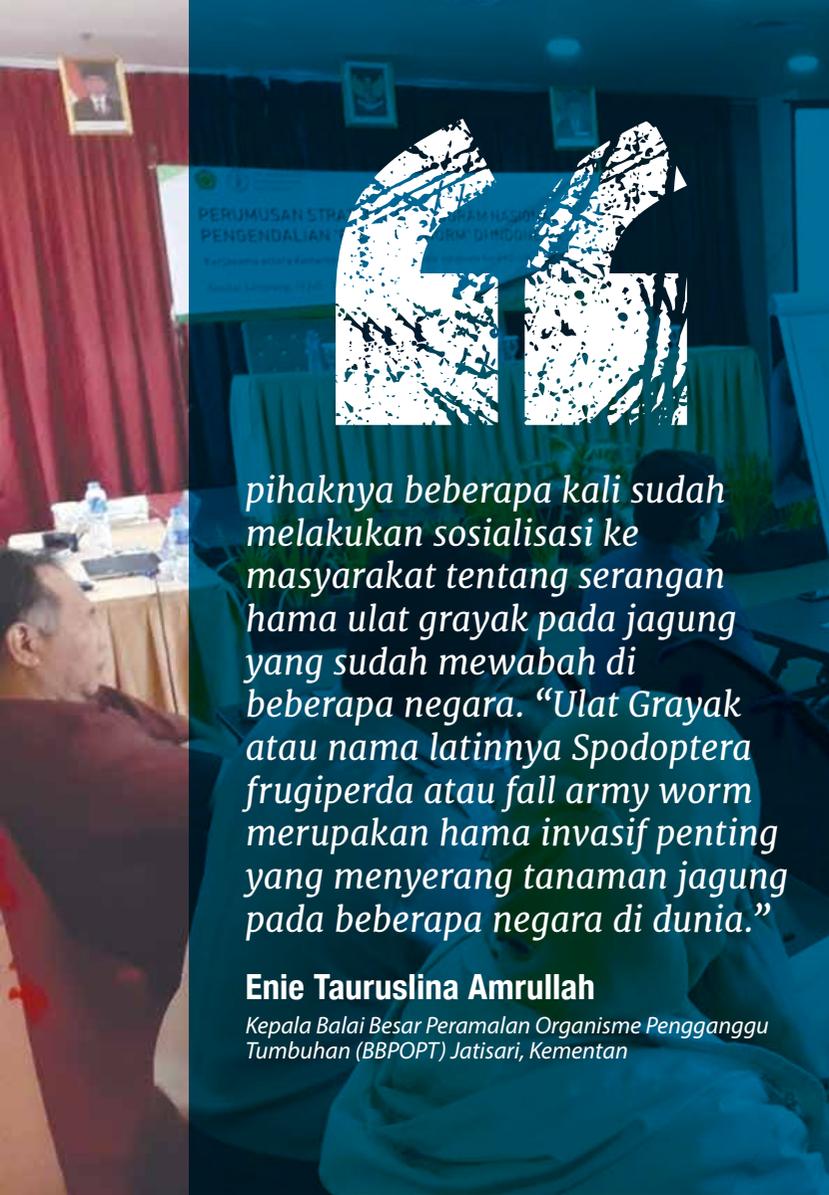


maupun penguatan melalui struktur organisasi yang ada.

Sementara itu, Kementan melalui Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan bekerja sama dengan Food and Agriculture Organization (FAO) melaksanakan pertemuan Perumusan Strategi dan Program Nasional Pengendalian Fall Armyworm di Indonesia pada 31 Juli-2 Agustus 2019 di Bandar Lampung. Pertemuan ini guna merumuskan penanganan serius terhadap hama baru pada tanaman jagung, yakni hama Spodoptera frugiperda atau ulat grayak frugiperda (UGF) agar tidak mengancam kesejahteraan petani jagung di nusantara.

Penanganan hama pada jagung ini harus dimulai dengan identifikasi yang merupakan poin kritis





pihaknya beberapa kali sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang serangan hama ulat grayak pada jagung yang sudah mewabah di beberapa negara. “Ulat Grayak atau nama latinnya Spodoptera frugiperda atau fall army worm merupakan hama invasif penting yang menyerang tanaman jagung pada beberapa negara di dunia.”

Enie Tauruslina Amrullah

Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) Jatisari, Kementan



untuk memetakan penyebarannya. Identifikasi juga menjadi kunci pelaksanaan upaya pengelolaan hama. “Ada beberapa ciri khusus yang menandai spesies ini dan yang paling mudah dilihat adalah terdapat huruf Y terbalik berwarna cerah pada bagian kepala dan terdapat empat titik hitam pada abdomen ke delapan yang membentuk kotak,” ujar Dewi Sartiami, pengajar IPB.

Di tempat terpisah, Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) Jatisari, Kementan Enie Tauruslina Amrullah mengatakan, pihaknya beberapa kali sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang serangan hama ulat grayak pada jagung yang sudah mewabah di beberapa negara. “Ulat Grayak atau nama latinnya Spodoptera frugiperda atau fall army worm merupakan hama invasif penting yang menyerang tanaman jagung pada beberapa negara di dunia,” ujarnya di Jatisari, Jawa Barat, Selasa (13/8/2019).

Untuk hama tikus, BBPOPT juga terus melakukan upaya pengendalian serangan terhadap tanaman padi. Di Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, petugas Pengendali OPT dari BBPOPT memberikan bimbingan tentang upaya pengendalian tikus. “Tikus

termasuk OPT yang sering menyerang tanaman padi, jadi harus dikendalikan kalau tidak ingin padi kita habis dimakannya,” ujar Yadi, petugas Pengendali OPT dari OPT kepada para petugas dan petani di Rengasdengklok, Karawang, Kamis (29/8/2019).

Di sisi lain, Kementan hingga saat ini tetap berkomitmen untuk melakukan penanggulangan dampak penggunaan pestisida kimia dalam praktik budidaya tanaman. Pasalnya, upaya ini dinilai dapat meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Edy Purnawan menjelaskan, kebijakan Kementan dalam mengurangi dampak penggunaan pestisida kimia dikeluarkan dalam bentuk peraturan Menteri Pertanian (Permentan) dan kegiatan-kegiatan Kementan.

“Pertama, melalui Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT). Kedua, melalui Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT); ketiga, melalui Demonstrasi Area Budidaya Tanaman Sehat; keempat, sosialisasi dan bimbingan teknis; serta terakhir, kegiatan pengujian rutin kandungan residu pestisida, cemaran logam berat dan aflatoksin,” ujarnya di Jakarta, Jumat (16/8/2019). **(tim humas)**

PELATIHAN PEMBEKALAN BAGI MAGANG TAIWAN



BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) LEMBANG



KEMENTAN-IRRI BERGANDENGAN ATASI STUNTING & PERUBAHAN IKLIM

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) dan International Rice Research Institute (IRRI) sepakat meningkatkan kerja sama untuk mendukung mengatasi stunting dan perubahan iklim. IRRI berkomitmen untuk memberikan *support* penelitian yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dalam bidang pemuliaan padi yang memiliki spesifikasi khusus. Selama ini kerja sama dengan Kementan RI telah berjalan dengan baik.

"Salah satu galur yang telah baru-baru ini dilepas atas kerja sama tersebut dan terus dikembangkan adalah varietas padi yang kaya kandungan Zink yang bermanfaat untuk mengatasi kekerdilan (stunting, red) dan juga varietas input rendah seperti Inpari 42 GSR dan Inpari 43 GSR," ujar Mathew Morrell, direktur jenderal (dirjen) IRRI dalam pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Momon Rusmono di sela pertemuan Special SOM-AMAF ke 40 di Hue City, Vietnam, Senin (5/8/2019). Hadir dalam pertemuan itu, Kepala Pusat Kerja sama Luar Negeri Ade Candra dan Kepala Balai Balai Pascapanen Litbang Pertanian, Prayudi Syamsuri.

Mathew menambahkan, ke depan kerja sama penelitian tidak hanya pada pemuliaan padi, namun dapat diperluas di bidang penelitian bioteknologi dan *remote sensing*. Peluang kerja sama selain penelitian, yaitu dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia (*capacity building*).



"Peningkatan *capacity building* ini melalui pemberian beasiswa untuk lanjut ke pendidikan S2 dan S3 serta training bagi peneliti-peneliti muda kita," ujarnya.

Sekjen Momon menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peran aktif IRRI membangun pertanian regional berbasis padi. Dukungan dan kerja sama dengan IRRI dipastikan dapat mengatasi masalah stunting dan penanganan perubahan iklim. "Kami menyambut baik dan atas nama Pemerintah RI memberikan apresiasi yang tinggi atas kesediaan IRRI terus bekerja sama dalam hal penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia yang sudah dimulai sejak 1960-an," tegasnya.

IRRI merupakan sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang berpusat di Los Banos, Filipina. Institut ini memiliki kantor perwakilan di beberapa Negara, termasuk di Indonesia. Tujuan utama IRRI untuk mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani beras, konsumen serta lingkungannya.

Sementara pertemuan SOM AMAF merupakan pertemuan berkala pejabat yang menangani sektor pertanian dari negara anggota ASEAN. Tujuan pertemuan ini untuk menjaga semangat negara anggota ASEAN untuk maju bersama terutama di sektor pertanian dalam

upaya meningkatkan keamanan pangan regional.

Di lain tempat, sekitar 54 petani milenial dari seluruh Indonesia terpilih mewakili desa mereka menjadi agen perubahan pertumbuhan ekonomi pertanian melalui kerja sama pertama Indonesia dengan Pemerintah Taiwan. Kementan melalui Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Peyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) melatih dan memberangkatkan 54 petani milenial angkatan I program magang petani milenial ke Taiwan.

Kepala Pusat Pelatihan Ir Bustanul Arifin Caya mengatakan, sejak 1984 BPPSDMP sudah mengembangkan kerjasama pelatihan melalui program magang di Jepang. "Ini adalah salah satu program percepatan kualitas SDM pertanian agar menjadi petani wirasusahawan yang handal mampu memproduksi produk pertanian kualitas ekspor. "Pada tahun ini kita memperluas kerja sama dengan Taiwan yang lebih berfokus pada tanaman hortikultura sayur dan buah-buahan," ujarnya Lembang, Bandung, Jawa Barat, Jumat (23/8/2019).

"Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan sukses. Sekarang Taiwan diserbu oleh tenaga kerja pertanian Indonesia," ujar Kepala Balai Besar Pelatihan (BBPP) Lembang Kemal Mahfud. BBPP Lembang menjadi tempat yang menggembelng petani milenial untuk siap secara mental, keilmuan dan keahlian untuk berhasil di Taiwan.

BBPP Lembang menggelar selama dua pekan pelatihan, 18 Agustus-1 September 2019 yang diikuti 54 petani milenial dari seluruh Indonesia di antaranya Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Bali, NTT, dan Sulawesi Tenggara. **(tim humas)**





PRESIDEN JOKOWI BLUSUKAN KE KAPAL TERNAK



PEMBANGUNAN peternakan mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ini dibuktikan saat mantan Gubernur DKI Jakarta itu *blusukan* ke Kapal Ternak Camara Nusantara (CN) 3 pada Rabu, (21/8/2019). Tidak hanya melihat proses loading masuknya ternak sapi ke kapal ternak, namun Jokowi yang akan dilantik sebagai presiden periode kedua pada 20 Oktober mendatang ini juga ikut menaiki kapal guna melihat langsung sapi yang telah memasuki kandang dalam kapal ternak CN 3.

Pada kunjungan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan rasa syukurnya bahwa telah tersedia kapal ternak yang melayani pengangkutan ternak sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk tujuan Pulau Jawa, terutama Jakarta dan sekitarnya dalam kondisi muatan penuh. Jokowi juga menyampaikan harapannya, bahwa ke depan ternak-ternak sapi NTT juga ada yang dikirim dalam bentuk daging beku ke wilayah konsumen.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) I Ketut Diarmita mengaku senang atas kunjungan Presiden Jokowi ke Kapal Ternak CN 3. "Kunjungan Presiden Jokowi melihat kapal ternak, merupakan bukti dukungan dan perhatian beliau yang besar kepada pembangunan peternakan," ujarnya di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Kamis (22/8/2019).

"Karena itu, kita harus terus bersinergi dan bahu-membahu antara pemerintah dan stakeholder, untuk dapat mewujudkan harapan presiden," ujar Ketut.

Menurut dia, sejak diresmikan penggunaan Kapal Khusus Ternak oleh pemerintah, pada 10 November 2015 hingga pertengahan 2019, jumlah ternak yang telah diangkut menggunakan dengan moda transportasi ini dari wilayah produsen mencapai 147.164 ekor.

"Melalui kapal ternak ini, kita berharap keberadaan ternak dan dinamika ketersediaan ternak di Indonesia dapat terpantau dengan baik, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah dalam penyediaan daging sapi menjadi lebih optimal," ungkapnya.

Ketut melanjutkan, pemanfaatan kapal ternak ini dapat dioptimalkan untuk mengisi muatan balik kapal dengan

produk yang dibutuhkan di daerah produsen, sehingga terjadi peningkatan hubungan perdagangan yang lebih baik antar-daerah. "Ini perlu dukungan pemerintah daerah (pemda) dalam memaksimalkan efektivitas pemanfaatan kapal ternak ini yang pada akhirnya mendukung pembangunan peternakan kedepan yang lebih baik," ungkap Ketut.

Anis, salah satu pengirim ternak sapi pengguna kapal ternak, yang juga berada di lokasi tersebut menyampaikan kebahagiaannya dapat bertemu Presiden Jokowi pada saat proses loading ternak sapi ke CN 3. Anis merasakan manfaat dengan adanya kapal ternak, yang dapat mengangkut ternak sapi dari NTT ke Jakarta, Samarinda, dan Banjarmasin. "Senang pakai kapal ternak karena susut bobot badan sapi sampai tempat tujuan lebih kecil dibanding pakai kargo dan sapi lebih terjamin selama perjalanan," ungkapnya.

Menurut Anis, penurunan bobot badan sapi yang diangkut dengan kapal ternak, berdasarkan pengalamannya selama ini kurang dari 10 persen, sedangkan kapal kargo lebih dari 10 persen. "Pengadaan kapal ternak merupakan progam pemerintah yang sangat bagus, solusi bagi kami peternak di NTT," tandasnya.

Senada juga disampaikan Benny, pengirim ternak sapi pengguna kapal ternak, saat ditemui di Pasar Ternak Lili Kabupaten Kupang. Benny lebih suka mengirimkan ternak-ternak sapi menggunakan kapal ternak, karena penurunan bobot badan sapi lebih rendah dibanding menggunakan kapal kargo. Berdasarkan pengalamannya, penurunan bobot badan ternak sapi yang dikirim dengan kapal ternak lebih rendah berkisar 6-8 persen, dibandingkan dengan kapal kargo yang mencapai 12-15 persen.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementan Fini Murfiani mengatakan, pengiriman sapi melalui fasilitas kapal khusus ternak membuat kualitas ternak dapat terjaga dari tempat asal hingga ke wilayah tujuan konsumsi.

Kepala Dinas Peternakan NTT Danny Suhadi mengungkapkan, pihaknya sangat berterima kasih atas fasilitas kapal ternak dari pemerintah pusat untuk mengangkut sapi dari NTT menuju wilayah produsen. Ada lima kapal ternak yang mengangkut ternak sapi dari NTT adalah kapal CN 1, CN 2, CN 3, CN 4, dan CN6. **(tim humas)**



BENIH ITU FONDASI

PEMBANGUNAN PERTANIAN

DALAM upaya peningkatan produksi tanaman pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) menitikberatkan pada penyediaan sarana produksi, salah satunya penyediaan benih unggul bersertifikat. *Nah* untuk penyediaan benih tersebut, Kementan menjalin kerja sama dengan produsen benih agar memproduksi sesuai kebutuhan petani.

Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Kementan Suwandi menjelaskan, dengan adanya program bantuan pemerintah dari Kementan menjadikan peluang bagi produsen benih untuk menyediakan benih yang berkualitas. Tentunya ada tahapan dalam membangun kekuatan sistem perbenihan.

"Pertama, membangun benih melalui penguatan sistem. Kedua, lakukan inovasi varietas. Ketiga, buka peluang pasar benih. Dan yang keempat, sinergi para pihak. Jadi saya tegaskan lagi, benih itu fondasi pembangunan pertanian kita. Benih lah yang menjadi penciri produktivitas," katanya dalam rapat dengan produsen benih di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVT-PP) Kementan Erizal Jamal menegaskan bahwa dalam mengedarkan benih padi, Kementan tidak akan main-main atau sembarangan. Sertifikasi benih merupakan jaminan keamanan bagi petani. "Karenanya, peredaran pelepasan benih tanpa izin berisiko merugikan petani dan membahayakan masyarakat," ujarnya, Sabtu (3/8/2019).

Terkait kasus peredaran benih IF8 di Aceh, dia mengatakan, perlu penanganan yang cermat. Semua pihak harus mematuhi aturan yang





Dengan adanya program bantuan pemerintah dari Kementan menjadikan peluang bagi produsen benih untuk menyediakan benih yang berkualitas. Tentunya ada tahapan dalam membangun kekuatan sistem perbenihan.”

Suwandi

Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Kementan

ada dan menjaga petani yang mengusahakannya dari kerugian yang tidak perlu terjadi. "Kami cek ke lapangan dan menemukan padi IF8 sudah mulai terserang hama wereng coklat. *Nah* jika sudah terjadi wabah seperti ini akan sulit menelusuri permasalahan karena benih tidak terdaftar," ujar Erizal.

Dia menambahkan, Kementan sudah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan varietas baru salah satunya dengan adanya OSS (Online Single Submission). Sebelumnya, Kementan telah membangun sistem perizinan online terintegrasi OSS yang sudah terhubung dengan kementerian, pemda, dan BKPM. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri No 29/Permentan/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.

Kepala Balai Besar Pengembangan dan Pengujian Mutu Benih TPH, Ditjen Tanaman Pangan Kementan Warjito mengatakan, pemerintah tidak ingin petani menanggung risiko kerugian akibat pelaku usaha yang tidak patuh aturan. "Dampak ekonomi akibat benih palsu dapat merugikan petani yang menggunakan benih dan berdampak bagi kerugian ekonomi suatu wilayah," katanya di Depok, Jawa Barat, Sabtu (10/8/2019).

Sementara itu, salah satu pengawasan atas peredaran benih di lapangan, yakni uji petik, sehingga dipastikan dapat memperoleh benih berkualitas. Contohnya, pada awal Agustus 2019 dilakukan kegiatan uji petik mutu benih tanaman pangan beredar di PT Benih Citra Asia, Penanggungan, Wirowongso, Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim). "Kegiatan yang kita lakukan saat itu untuk mengevaluasi tingkat mutu benih yang beredar di pasaran, apakah masih layak atau tidak," ujar Kepala Bidang Informasi dan Jaringan Laboratorium, Balai Besar PPMB-TPH Cimanggis, Tri Martini di Depok, Selasa (13/8/2019).

Di lain pihak, Kementan terus mengupayakan peningkatan produksi dengan menggenjot penambahan luas tambah tanam pada musim gadu. Karena itu, Kementan juga mengupayakan pemenuhan benih dengan menggerakkan pola kemitraan penangkar dengan produsen. "Benih bermutu menjadi kebutuhan utama agar mampu menggenjot produksi," ujar Kepala Sub Direktorat Pengembangan Produksi Benih, Ditjen Tanaman Pangan Kementan Suharyanto di Jakarta, Senin (19/8/2019).

Ia menegaskan, untuk menjamin penyediaan benih bermutu, salah satu program yang dijalankan Kementan, yakni memberdayakan penangkar benih. Pihaknya memfasilitasi bantuan untuk kelompok penangkar agar mereka mampu mencukupi kebutuhan di kelompoknya sendiri dan bisa jadi dapat menjual sebagian hasilnya.

Kepala Sub Direktorat Pengawasan Mutu Benih, Ditjen Tanaman Pangan Kementan Catur Setiawan



menjelaskan, penggunaan benih varietas unggul bersertifikat yang dibarengi dengan penerapan teknologi yang tepat telah terbukti memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan. "Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, pemerintah dari tahun ke tahun telah mengalokasikan bantuan benih melalui baik itu Bantuan Benih, Cadangan Benih Nasional maupun Subsidi Harga Benih," katanya di Jakarta, Senin (26/8/2019).

Untuk benih kedelai, Kementan mencanangkan kegiatan Pengembangan Petani Produsen Benih Kedelai (P3BK) guna menjamin penyediaan dan kebutuhan benih bersertifikat. Ini penting mengingat kebutuhan kedelai meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan berbahan baku kedelai. "Penyiapan bahan baku pangan yang segar perlu dilakukan dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal dengan mendorong petani menanam kedelai bersertifikat," kata Kepala Sub Direktorat Pengembangan Varietas Perbenihan, Ditjen Tanaman Pangan Sigit Setawan di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Sedangkan untuk benih cabai, program Kementan pada 2019 ini memberikan dalam komponen pilihan benih bersertifikat, pupuk organik terdaftar, dolomit, mulsa, bahan pengendali OPT (feromon/antraktan, perangkat likat berwarna, agens hayati berstandar mutu). "Pak Mentan meminta turun ke lapangan karena inflasi 0,1 persen dinilai tinggi. Wilayah Jawa Timur (Jatim) perlu ditengok karena wilayah ini penyangga nasional. Sedangkan Jakarta menjadi indikator akibat imbas

harga. Di sini saya ingin mendorong pola tanam," ujar Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto di Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu, Blitar, Jatim, Sabtu (3/8).

Sementara sejak Kementan mencanangkan Program Swasembada Bawang Putih Nasional 2021 dua tahun silam, berbagai pihak mulai menunjukkan komitmennya untuk bersama pemerintah mewujudkan program tersebut mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Tak terkecuali juga pelaku-pelaku usaha daerah di Jatim. Sebagai salah satu perusahaan plat merah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, Puspa Agro yang didirikan semenjak era Gubernur Sukarwo telah menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemajuan agrobisnis dan agroindustri di Jatim.

Abdullah Muchifudin, direktur salah satu BUMD di Jatim menyampaikan bahwa hingga saat ini benih bawang putih yang sudah dikuasainya mencapai 180 ton dengan kondisi berbagai umur simpan. **(tim humas)**



TEGAS, KONKRET, DAN BERKOMITMEN ANTIKORUPSI

Dugaan Suap Izin Impor Bawang Putih, Pejabat Dicipot

SEBAGAI garda terdepan dalam pencegahan korupsi kolusi nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) dan melawan mafia pangan, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman langsung mengambil langkah tegas menonaktifkan atau mencopot pejabat Eselon II, III, dan IV Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura seiring dengan verifikasi wajib tanam bawang putih. Ini sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) pada, Selasa (12/8/2019) terkait kasus dugaan suap izin impor bawang putih.

"Dirjen Hortikultura bergerak mulai kemarin (13/8/2019, red), mengecek kondisi riil lapangan. Kalau ada yang main-main akan segera ditindak," tegas Amran saat ditemui di kantor Ditjen Hortikultura, Rabu (14/8).

Dia sangat mendukung penuh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus suap impor bawang putih ini secara terang benderang, sehingga publik 'clear' melihat masalah ini. Amran merasa perlu mengambil langkah tegas, konkret, dan segera sebagai komitmennya dalam mendukung antikorupsi. Langkah ini perlu untuk dilakukan demi reputasi Kementan yang diakui kinerja positifnya dalam membangun perekonomian Indonesia. "Kemarin KPK mengambil data dari sini (Ditjen Hortikultura,



red) mengenai verifikasi wajib tanam," ungkap Amran.

"Kami dukung KPK sepenuhnya. Kami apresiasi dan salut kepada KPK. Karena sejak awal sudah ada tiga orang Satuan Tugas (Satgas) KPK di Kementan untuk pencegahan korupsi. Itu bukti keseriusan bahwa kami ingin Kementan berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan masyarakat," lanjutnya.

Langkah tegas Mentan ini juga guna menjaga marwah Kementan sebagai lembaga yang telah dua kali mendapatkan penghargaan antigratifikasi pada 2017 dan 2018 dari KPK. Ia tidak ingin terjadi fitnah dan merusak nama baik kementerian yang dipimpinnya. "Hingga saat ini, ada sekitar 145 orang pegawai di Kementan yang telah dipecat dan demosi karena bermasalah. Bahkan secara keseluruhan di Kementan terdapat 1.432 pegawai telah didemosi dan mutasi arena berani main-main," tegasnya.

Sebenarnya langkah antisipasi telah dilakukan sejak tiga tahun terakhir. Caranya, yaitu dengan mem-blacklist importir yang tidak menyelesaikan kewajiban tanam. Bahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah tercatat ada 72 perusahaan bawang yang di-blacklist oleh Ditjen Hortikultura. Kebanyakan merupakan produk impor bawang putih, bawang merah dan bawang bombay.

Justan Siahaan, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan mengatakan, pencopotan seluruh pejabat Eselon II, III, dan IV Ditjen Hortikultura ini untuk memberikan ruang yang luas bagi KPK guna melakukan penyelidikan. "Kementan sangat terbuka bagi KPK untuk mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus suap impor bawang putih secara terang benderang, sehingga publik 'clear' melihat

masalah ini. Meskipun sebenarnya belum diketahui keterlibatan pejabat Kementan, tapi Mentan merasa perlu mengambil langkah tegas, kongkret, dan segera sebagai komitmennya dalam antikorupsi. Langkah ini perlu untuk memitigasi risiko reputasi Kementan sedang diakui kinerja positifnya dalam perekonomian Indonesia,” ujarnya di Kantor Pusat Kementan, Jakarta (13/8/2019).

Justan juga membantah dengan keras adanya tudingan bahwa langkah Mentan Amran mencopot pejabat eselon II, III, dan IV Ditjen Hortikultura melanggar arahan Presiden Joko Widodo yang meminta menteri tak keluar kebijakan, dan merombak jabatan strategis sampai Oktober 2019. “Di kementerian strategis itu setara dirjen. Kami sangat alert dengan arahan presiden dimaksud saat mengambil keputusan itu, dengan kemungkinan reaksi dari yang bersangkutan. Alert, kami alert bahwa negara kita negara hukum,” tegasnya di Jakarta (16/8).

Justan menilai tudingan ini keliru sebab pencopotan tersebut merupakan bentuk tindakan tegas sebagai komitmen tidak memberikan toleransi terhadap korupsi. Adanya peluang atau celah dalam pengawasan, sehingga Mentan ambil sikap lebih awal dengan pencopotan sementara dari jabatan saat ini.

“Pencopotan ini merupakan langkah strategis mengikuti PP No 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan ini mengamankan pimpinan kementerian atau lembaga (K/L) untuk memitigasi risiko. Risiko korupsi sangat strategis di Kementan, dan keputusan mencopot sementara adalah tindakan strategis. Pak menteri memiliki sikap yang jelas akan kasus suap bawang putih ini, memberikan ruang yang luas bagi KPK untuk melakukan penyelidikan,” tegasnya. **(tim humas)**



BEBERAPA waktu lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro turut mengapresiasi upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memacu produksi nasional. Bahkan, capaian itu mampu melampaui target-target yang telah ditetapkan.

“Karena itu, program yang ada harus didukung dan dibuat secara berkelanjutan. Saya melihat banyak sekali capaian pembangunan pertanian yang dilakukan Kementan selama empat setengah tahun terakhir,” ujar Bambangnya.

Bambang mengatakan, capaian itu di antaranya berhasil melakukan pencetakan lahan baru, penambahan lahan pertanian produktif, peningkatan produksi produk pertanian dan pemanfaatan mekanisasi yang terus dijalankan.

Maka itu, kata dia, Bappenas akan mempererat kerja sama dan sinergitas berkelanjutan dengan Kementan. Langkah ini perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai ekspor bahan mentah maupun olahan makanan.

Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Bappenas Boediastoeti Ontowirjo menyatakan, Bappenas telah melakukan riset terhadap efektivitas belanja kementerian dan lembaga (K/L) pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, dan hasilnya menyebutkan program Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Menteri Kelautan dan Perikanan (Men KP) Susi Pudjiastuti memacu pertumbuhan daerah.

Peningkatan pada belanja barang di Kementan dinilai memiliki elastisitas atau daya dongkrak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, ketimbang belanja modal. “Belanja barang yang dilakukan Kementan merupakan contoh salah satu belanja barang produktif yang memacu pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi di daerah adalah belanja alat mesin pertanian dan input produksi,” katanya.

Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi sependapat dengan hasil riset Bappenas terkait efektivitas belanja kementerian dan lembaga pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana menyebutkan program Mentan Amran Sulaiman dan Men KP Susi Pudjiastuti memacu pertumbuhan daerah. Karena itu, Gandhi menilai secara tidak langsung hasil riset Bappenas terhadap kinerja Kementan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan sektor pertanian dan perikanan Indonesia memiliki kontribusi penting bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional.

LAMPAUI TARGET, KEMENTAN PACU PERTUMBUHAN DAERAH



Bappenas akan mempererat kerja sama dan sinergitas berkelanjutan dengan Kementan. Langkah ini perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai ekspor bahan mentah maupun olahan makanan.”

Bambang Brodjonegoro

*Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas)*

"Pertama, kontribusi devisa. Ekspor produk pertanian dan produk perikanan yang menggantikan produk impor akan menjadi sumber penting bagi surplus Neraca Perdagangan. Merujuk data BPS, ekspor komoditas pertanian pada 2013 hanya 33 juta ton, namun pada 2018 melonjak tajam menjadi 42,5 juta ton sehingga ada kenaikan 9 juta ton dan rata-rata kenaikan ekspor per tahunnya 2,4 juta ton. Kedua, kontribusi produk dan ketiga, kontribusi menurunkan kemiskinan," jelasnya di Bogor, Senin (19/8/2019).

Pengamat kebijakan publik Prof Tjipta Lesmana mengungkapkan, data Kementerian PPN/Bappenas itu memang telah tepat dan dapat dipecahkan dengan banyak capaian. Ini menunjukkan Mentan Amran adalah sosok pekerja keras yang serius ingin mengembalikan kejayaan pertanian Indonesia. Hal lainnya Amran harus diakui punya banyak ide terobosan guna meningkatkan kemajuan pertanian untuk kepentingan bangsa.

"Memang selama hampir lima tahun terakhir ini, sudah banyak hasil dicapai Kementan dibawah pimpinan Menteri Amran yang menyumbangkan kontribusi positif kepada ekonomi Indonesia," ujarnya, Selasa (20/8/2019).

Pakar Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (Unisba) Rabiatul Adwiyah mengungkapkan dalam riset Bappenas yang dimaksud, belanja barang Kementan yang dipimpin Amran Sulaiman berupa alat mesin pertanian (alsintan) lebih besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di pedesaan atau masyarakat ketimbang belanja barang KKP berupa belanja pengadaan kapal, yang dipimpin Susi Pujiastuti. Setiap peningkatan satu persen belanja alsintan, maka mendorong 0,33 persen peningkatan subsektor pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian di daerah. Sementara dengan setiap peningkatan 1 persen belanja pengadaan kapal, hanya dapat mendorong 0,33 persen terhadap peningkatan subsektor perikanan di daerah.

"Torehan ini tentu sangat signifikan dengan program terobosan dan implementasinya di lapangan, karena Mentan Amran Sulaiman sangat serius mengembalikan kejayaan pertanian Indonesia. Faktanya pertanian Indonesia saat ini menjadi modern. Alat mesin pertanian modern tidak hanya di Jawa atau sentra produksi, tapi sudah sampai ke lahan pertanian yang ada di pelosok atau perbatasan," jelasnya di Bandung, Rabu (21/8/2019).

Pengamat Ekonomi Politik Pertanian Universitas Trilogi sekaligus pembina Indonesia Food Watch (IFW) Muhamad Karim menilai secara kacamata ekonomi politik, kebijakan pembangunan pertanian selamat empat tahun lebih era Pemerintahan Jokowi-JK mampu berkontribusi dalam mendorong kinerja positif ekonomi makro. Melansir data BPS, pertama, berhasil menekan inflasi menjadi 1,26 persen. "Kedua, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Usaha Tingkat Petani (NUTP) yang mengukur daya beli petani naik menjadi



Torehan ini tentu sangat signifikan dengan program terobosan dan implementasinya di lapangan, karena Mentan Amran Sulaiman sangat serius mengembalikan kejayaan pertanian Indonesia. Faktanya pertanian Indonesia saat ini menjadi modern. Alat mesin pertanian modern tidak hanya di Jawa atau sentra produksi, tapi sudah sampai ke lahan pertanian yang ada di pelosok atau perbatasan."

Rabiatul Adwiyah

Pakar Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (Unisba)

0,42 persen dan 5,45 persen di tahun yang sama," ujarnya di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Ketiga, kata Karim, kebijakan pangan Mentan Amran dalam mengungkit ekspor pun berbuah manis. Akumulasi nilai ekspor sejak 2015 hingga 2018 mencapai Rp1.764 triliun atau terjadi peningkatan sebesar 29,7 persen. Keempat, BPS pun mencatat, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan investasi di sektor pertanian melesit. **(tim humas)**





GRAND DESIGN HORTIKULTURA DAN PERTANIAN ORGANIK

KEMENTAN-Jakarta: Sebagai salah satu negara tropis dunia yg dilalui lintang khatulistiwa, Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah ruah. Ribuan varietas hortikultura meliputi buah-buahan tropis, aneka sayuran, tanaman hias dan tanaman obat tersedia di negeri berjuluk Zamrud Khatulistiwa ini. Indonesia sangat berpotensi menghasilkan produk-produk hortikultura yang berdaya saing mengisi pasar ekspor dunia. Tak berlebihan jika Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia 2045.

Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto menjelaskan pihaknya kini sedang menyusun grand design guna memastikan arah Pembangunan Hortikultura 2020-2024 berjalan sesuai target dan tahapan yang jelas. "Kami ingin pengembangan hortikultura bisa ditata sedemikian rupa agar mampu menjawab tantangan dan peluang mengisi pasar ekspor dunia. Tentunya diperlukan grand design yang lebih progresif untuk mengoptimalkan potensi hortikultura Indonesia. Salah satunya melalui pengembangan kawasan hortikultura berbasis korporasi,"ujarnya di sela kegiatan melepas ekspor bawang merah ke Thailand dan Singapura di Kompleks Pergudangan Marunda Tarumajaya Bekasi, Jawa Barat, Rabu (2/8/2019).

Prihasto menjelaskan, ide awal penyusunan grand design ini dari kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) yang digagas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. "Rakyat miskin diberi paket bantuan 50 ekor ayam, benih sayuran dan benih buah-buahan agar pendapatan mereka meningkat pada jangka pendek, menengah dan panjang" tutur pria yang akrab dipanggil Anton itu.

Sementara itu, Kementan menginisiasi kegiatan pilot project pengembangan kawasan perbenihan jagung berbasis korporasi petani pada 2019. Ini untuk mewujudkan arahan Presiden Jokowi untuk

membangun korporasi petani.

Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan Kementan Takdir Mulyadi menjelaskan, penguatan kelembagaan kawasan korporasi tersebut dilakukan melalui pengawalan, pembinaan dan pendampingan dalam teknik produksi benih jagung. Kemudian dengan memberikan bantuan sarana produksi, alsintan, infrastruktur dan akses pasar.

"Bentuk dukungan bantuan yang diberikan ke petani berupa sarana produksi benih sumber, pestisida dan pupuk," demikian dijelaskan Takdir di Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Di lain pihak, Kementan menggalakkan kembali pertanian organik karena diakui mempunyai manfaat ekologis yang lebih bagus. Sistem ini mampu memperbaiki mutu lahan yang terdegradasi akibat penggunaan pupuk anorganik secara terus-menerus. Sistem ini juga menghindarkan dampak kesehatan dan ekologis dari residu pestisida kimiawi sehingga dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat dan berkualitas.

"Pada 2015 mencanangkan program 1.000 Desa Pertanian Organik yang juga merupakan salah satu Nawacita Kabinet Kerja RI, dan untuk tanaman pangan targetnya 600 desa padi organik," ujar Kepala Sub Direktorat Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering, Ditjen Tanaman Pangan Kementan Dina.

Salah satu yang telah berhasil berbudidaya organik ada di Kalimantan Barat (Kalbar), yakni Kelompok Tani Gampang Mulia Desa Sate Lestari Kecamatan Pulau Maya. Heri Muryadi dari Dinas Pertanian Kayong Utara mengatakan, mereka memproduksi beras organik varietas Mentik Wangi untuk beras putih dan beras merah yang sudah sertifikasi pada 2018. "Banyak petani di Kabupaten Kayong Utara yang tertarik untuk bertani organik. Tentunya karena harganya tinggi," ujarnya. **(tim humas)**



TANTANGAN KEMARAU DAN KOMITMEN KEMENTAN AMANKAN PRODUKSI PANGAN

SEJAK beberapa waktu yang lalu, Kementerian Pertanian (Kementan) sudah melakukan upaya mengurangi dampak atau mitigasi kekeringan. Bahkan, awal Agustus kemarin telah dilakukan koordinasi mengumpulkan pemangku kepentingan di delapan provinsi yang terdampak kekeringan. Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, Dandim, dan Perum Jasa Tirta berkumpul bersama merumuskan upaya mitigasi dan adaptasi dampak kemarau. Inilah wujud komitmen Kementan mengamankan produksi pada saat kemarau.

“Pada prinsipnya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan pada musim kemarau ini. Untuk yang sudah terkena puso (gagal panen, red) kita inventarisir apakah sudah ikut serta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) belum? Kalau sudah, maka segera klaim. Untuk yang belum ikut AUTP, Kementan menyediakan benih, maka segera usulkan bantuan benih ke Dinas setempat,” Suwandi di Jakarta, direktur jenderal (dirjen) Tanaman Pangan, Kementan, Kamis (8/8/2019).

Dalam hal pengelolaan irigasi, dia menyebutkan, Kementan melakukan pendekatan dengan Perum Jasa Tirta I dan II. Hasilnya, telah sepakat mengatur pembagian penyediaan air ke wilayah-wilayah yang rawan terdampak kekeringan. “Langkah selanjutnya kami juga membuat posko kekeringan di setiap kabupaten sebagai pusat informasi dan koordinasi langkah pengamanan pertanaman di wilayah masing-masing. Di dalamnya ada beberapa pihak baik dari penyuluh, Dinas Pertanian, Dinas Pengairan maupun TNI,” terangnya.

Bagaimana dengan tanaman padi yang masih aman? Suwandi menjelaskan, tentunya Kementan juga mengamankan standing crop dengan mengawal pertanamannya. Bahkan Kementan juga memanfaatkan juga pertanaman padi gogo sawah. Ada delapan kabupaten di wilayah pantai utara Jawa (Pantura) yang dipantau harian oleh Kementan sampai saat ini, yaitu di Bekasi, Karawang, Purwakarta, Indramayu, Subang, Cirebon, Kuningan dan Majalengka yang sedang melakukan pertanaman padi gogo sawah seluas sekitar 58.800 hektare (ha). “Kami siapkan bantuan olah tanah

dan benih asalkan petani mau menanam padi gogo sawah ini,” ujarnya.

Sementara di tengah mengatasi kemarau, Kementan juga mengejar target produksi pangan 2019 di Jawa Barat (Jabar) dan Banten. Karena itu, Selasa (6/8/2019), digelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama penanggungjawab Program Upaya Khusus (Upsus) kabupaten di Jabar dan Banten.

Dirjen Suwandi mengapresiasi surplus luas tanam padi pada Oktober-Juli 2018/2019 ini dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, ia meminta kepala dinas dan pihak terkait agar dapat dihitung produksi pada 2019 mengingat sisa waktu hanya dua bulan lagi.

“Pada Agustus dan September ini kita harus pacu luas tambah tanamnya agar bisa dihitung panen di November dan Desember tahun ini,” ujarnya.

Suwandi optimistis luas tambah tanam dapat ditingkatkan sebab saat ini sudah ada delapan kabupaten di Pantura yang sedang percepatan tanam padi gogo seluas 58 ribu ha. Selain itu, luas tambah tanam juga dapat ditingkatkan juga dengan memanfaatkan potensi galengan, yakni dimanfaatkan dengan menanam kedelai di pematang, sehingga swasembada kedelai pun bisa dicapai.

Selain Jabar dan Banten, Ditjen Tanaman Pangan juga menggelar Rakor bersama penanggungjawab Program Upsus Kabupaten di Sekuro Villages, Jepara, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (14/8/2019). Suwandi menginstruksikan agar daerah tidak membiarkan sedikitpun lahan yang menganggur atau tidak tertanami. Lahan bekas sawah dapat ditanami komoditas yang lain seperti padi gogo, jagung, kedelai, dan sebagainya sambil menunggu masa penghujan tiba. “Sebagai contoh, program padi gogo yang telah lama dipraktekkan di Jateng. Padi gogo diperuntukkan untuk lahan bekas sawah yang tidak memiliki sumber air atau irigasi,” katanya.

Di lain pihak, petani di Demak, Jateng memanfaatkan musim kemarau dengan menanam kacang hijau atau ijo seluas 20-an ha sembari nunggu hujan ke depan. “Mereka memilik kacang ijo karena berumur pendek,

dua bulan sudah dipanen. Silakan petani menanam padi maupun palawija di saat musim gadu ini. Di Jateng juga akan tanam padi gogo sekitar 15 ribu ha, ada juga jagung dan kedelai di Agustus ini,” ujar Suwandi saat meninjau lahan pertanian di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Rabu (14/8/2019).

Sedangkan di Gunung Kidul, Di Yogyakarta, petani setempat bahkan sempat melakukan panen padi di tengah kemarau panjang. Ini karena dukungan program budidaya padi dari Kementan yang tidak hanya berorientasi semata-mata pada peningkatan produksi saja, tapi juga meningkatkan kualitas lingkungan.

Suwandi mengatakan, program tersebut, yakni Budidaya Tanaman Sehat (BTS) sebagai langkah nyata dalam mengamankan produksi dari ancaman wereng dan daya dukung lingkungan yang menurun. “Di Kabupaten Gunung Kidul, program ini mulai dilaksanakan sejak 2017,” katanya dalam kunjungan kerja bersama Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Desa Ponjol, Gunung Kidul, Kamis (15/8/2019).

Di tengah kemarau, panen pagi juga dilakukan Kelompok Tani (Poktan) Sri Rahayu bersama Dirjen Suwandi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Hanafi di Kampung Waluya Desa Kertawaluya Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang, Jabar, Kamis (29/8).

Suwandi menyatakan, pertanaman di desa ini menarik karena petani mampu panen dengan produktivitas dari hasil ubinan 9 ton per hektar padi dari varietas Inpari 32. Dengan harga gabah (GKP) rata-rata Rp 5 ribu. “Berarti ada hasil bersih Rp 35 juta setelah dikurangi biaya produksi Rp10 juta per hektar,” ujarnya.

Selain itu, Kementan juga mengamankan pasokan cabai. Langkah-langkah perbaikan produksi hingga pasca panen cabai gencar dilakukan. “Lahan cabai memang banyak yang terdampak kekeringan, sehingga berpengaruh terhadap produksi. Belum lagi imbas dari jatuhnya harga cabai beberapa waktu lalu yang berlangsung cukup lama membuat petani tidak optimal merawat tanamannya,” ujar

Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto, saat melakukan monitoring lapang cabai di lahan cabai Desa Kerpangan, Kecamatan Leces, Probolinggo, Jawa Timur (Jatim), Kamis (15/8/2019).

Sedangkan melalui workshop LTT dan peninjauan lapang, Warjito Kepala Balai Besar PPMB-TPH selaku Penanggung Jawab UPSUS (Upaya Khusus) Kabupaten Karanganyar, Jateng mengoptimalkan penambahan luasan tanam di musim kemarau ini dengan menyisir lahan yang masih berpotensi di 17 kecamatan. “Kami bergerak ke kecamatan Colomadu, Gondangrejo, Jaten, Jatipuro, Jatiyoso, Jenawi, Jumantoro, Jumapolo, Karanganyar, Karangpandan, Kebakkramat, Kerjo, Matesih, Mojo Gedang, Ngargoyoso, Tasikmadu dan Tawangmangu untuk memastikan masih ada potensi lahan yang bisa segera ditanam di dua bulan ini,” katanya di Karangnyar, Sabtu (31/8).

Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Ditjen Tanaman Pangan Enie Tauruslina mengungkapkan, untuk mengejar jadwal tanam dan memafaatkan sumber air yang tersisa, sebagian petani di daerah pantura menerapkan sistem tanam benih langsung (tabela) hambur. Selain itu, sistem tabela pun dipercaya dapat menekan biaya produksi terutama dalam penggunaan tenaga kerja. “Namun, sistem tanam tabela ini juga harus memperhatikan resiko serangan OPT. Dengan teknik tabela ini harus antisipasi juga kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit,” jelasnya di Jakarta, Sabtu (17/8/2019).

Di tempat terpisah, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor mengapresiasi besarnya kontribusi Kementan dalam menanggulangi asap kebakaran lahan di musim kemarau. Kontribusi itu di antaranya melakukan pembangunan infrastruktur penampung air serta menghijaukan area kering dengan perkebunan. “Saya cuma mau kasih contoh satu saja, yaitu di Kementan. Jadi pada saat musim hujan, mereka langsung sigap dengan menurunkan berbagai kegiatan. Saya kira itu sudah merupakan bagian dari pencegahan,” ujarnya dalam rapat pencegahan asap bersama Presiden Joko Widodo, Rabu (7/8/2019).

Sahbirin mengatakan, pencegahan semacam itu hendaknya mendapat apresiasi dari semua pihak. Terlebih persoalan asap adalah persoalan urgensi yang mendapat perhatian langsung dari Presiden Jokowi.

(tim humas)





Perpaduan Hasil Bumi dan Ikan dalam Tekwan

Disajikan bersama sohun, irisan bengkoang, jamur, campuran daging ikan dan tapioka jadi ciri khas Tekwan. Kuliner khas Palembang, Sumatera Selatan ini juga makin lengkap dengan taburan daun bawang, seledri serta bawang goreng.



**Mekanisasi (pertanian).
Ini satu hal yang telah
lama kucita-citakan
dan idam-idamkan.**

-Ir Soekarno-

Presiden Republik Indonesia ke-1



Pidato peletakan batu pertama Gedung
Fakultas Pertanian di Bogor 27 April 1952

#SDMUnggul

#IndonesiaMaju